



infoKOM.X

Edisi Agustus 2022 | Majalah Internal Komisi X



77 TAHUN
RI MERDEKA
SUDAHKAH GURU
HONORER MERDEKA?

**PENANGGUNGJAWAB:**

H. Syaiful Huda
(Ketua Komisi X)

Agustina Wilujeng P., S.S., M.M.
(Wakil Ketua)

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
(Wakil Ketua)

Dr. Dede Yusuf ME., S.T., M.I.Pol.
(Wakil Ketua)

Dr. H. Abdul Fikri Faqih.
(Wakil Ketua)

KETUA PENGARAH:

Dadang Prayitna

WAKIL KETUA PENGARAH:

Ahmad Mufarod, Iis Annisa

PIMPINAN REDAKSI:

Hasan Basri

WAKIL PIMPINAN REDAKSI:

Nurdin, Henny Listyowati,
M. Masad Masrur, Khaerul Anam,
Nuzul Husna, Anna Kurniawati,
Leonardo L. Krisnada, Imam
Yulianto, Khalilah.

STAF REDAKSI:

Sugiyanto, Eva Dwi Cahyanti,
Komaria Mahmud, Fathurahman,
Dwi Lestari.

LAYOUT:

Hasan Basri, Muhamad
Nurhayadi, Dimas.

ALAMAT REDAKSI:

Nusantara I Komisi X

EMAIL:

komisi10@dpr.go.id
komisi10dprri@gmail.com

TELP:

021-5756035/021-5756033

MEDIA SOSIAL:

Instagram: @komisix
Facebook: komisix

PENGANTAR PIMPINAN KOMISI X DPR RI



H. Syaiful Huda
(Ketua Komisi X)

Agustina Wilujeng P., S.S., M.M.
(Wakil Ketua)

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
(Wakil Ketua)

Dr. Dede Yusuf ME., S.T., M.I.Pol.
(Wakil Ketua)

Dr. H. Abdul Fikri Faqih.
(Wakil Ketua)

Ditahun 2022 ini, DPR RI periode 2019-2024 telah memasuki tahun ketiga masa pengabdian dan kinerjanya. Pandangan publik terhadap DPR (selanjutnya ditulis dewan) juga beragam, seiring kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Pro dan kontra selalu menjadi warna dari respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah selaku unsur eksekutif. Dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentu saja meniscayakan peran dewan di dalamnya, utamanya dalam fungsi kontrol atau pengawasan. DPR RI berdasarkan konstitusi dan UU MD3 memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, masyarakat sering mempertanyakan peran DPR dalam suatu kebijakan pemerintah, bahkan tidak sedikit masyarakat menuntut dewan untuk lebih keras bersuara.

Komisi X DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi pendidikan, kebudayaan, ristek, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Adapun mitra kerja Komisi X yaitu Kemendikbudristek, Kemenparekraf/Baparekraf, Kemenpora, dan Perpustakaan. Berdasarkan bidang dan mitra kerjanya, Komisi X fokus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai ruang lingkupnya.

Komisi X menyadari bahwa masyarakat banyak menanyakan bagaimana kinerja dewan sebagai unsur legislatif dalam merespon kebijakan pemerintah. Kami memahami banyak permasalahan dan isu strategis yang hadir di publik yang diharapkan memiliki keberpihakan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, Komisi X memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

Kehadiran majalah ini, merupakan salah satu ikhtiar Komisi X untuk menyapa publik sekaligus mengabarkan kinerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Tentu saja edisi ini tidak dapat merekam seluruh kegiatan. Namun kami mencoba menyajikan topik utama yang selalu menjadi sorotan, yaitu mengenai guru dan tenaga kependidikan honorer. Permasalahan ini menjadi salah satu fokus Komisi X dalam dua tahun terakhir ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mewakili daerah pemilihannya masing-masing, mulai dari Sabang sampai Merauke. Semoga kami terus konsisten menjalan amanah sebagai wakil rakyat.

Selamat Membaca

Daftar Isi



TAJUK

- 3** Setelah 77 tahun Merdeka, Guru (sudah) Merdeka.

LAPORAN UTAMA

- 5** Guru Honorer PR Kemerdekaan

BERITA UTAMA

- 9** Penghapusan Rekrutmen CPNS Guru, Dede Yusuf: Khianati Perjuangan
- 10** Pengangkatan PPPK Timbulkan Kecemburuan pada Guru yang Tidak Lulus
- 11** Terkait Rekrutmen Guru PPPK, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda : Koordinasi Belum Efektif

LEGISLASI

- 12** Mengupayakan Kesejahteraan Psikologis Masyarakat.
- 15** Upaya Memaksimalkan Potensi Olahraga.

BERITA ANGGOTA

- 22** Pendidikan
- 50** Olahraga
- 55** Wisata
- 66** KUNJUNGAN KERJA
- 70** PANDANGAN MINI FRAKSI
- 72** OPINI MASYARAKAT
- 74** DAFTAR ANGGOTA KOMISI X

TAJUK RENCANA



Setelah 77 Tahun Merdeka, **Guru (Sudah) Sejahtera?**

Meski negara telah memberikan perlindungan dan penghargaan profesi Guru (Pendidik) melalui UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sampai saat ini masalah Guru masih carut-marut terutama masalah kejelasan status kepegawaian, kesejahteraan, dan jaminan sosial.

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa tidak terlepas dari peran para guru, dalam buku Pendidikan Yang Berkebudayaan, Yudi Latif mencatat hingga abad ke-19 kaum gurulah yang pertama kali memperkenalkan gerakan kebangkitan nasional yang mendorong kemerdekaan Indonesia.

Dalam catatan Dion Ginanto, terdapat kurang lebih 10 guru yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional yang turun gunung untuk membantu kemerdekaan tanah air; di antaranya: pertama, Presiden Soekarno, pernah mengajar mata pelajaran sejarah di Sekolah Ksatirian, sekolah yang didirikan oleh Dr. Setiabudi (Dowes Deker) di Bandung. Selain di Bandung, Bung

Karno juga pernah menjadi guru di Sekolah Rendah Agama milik Muhammadiyah, sewaktu beliau diasingkan di Bengkulu, kedua, Jenderal Sudirman, pernah bekerja sebagai guru dan bahkan diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah dasar milik Muhammadiyah, ketiga, HOS Cokroaminoto, berkat kepiawaian beliau dalam mengajar dan menginspirasi lahirnya tokoh-tokoh nasional dari murid-murid HOS Tokroaminoto, keempat, Ki Hajar Dewantara, bersama istri dan koleganya mendirikan sekolah, serta aktif membuat majalah yang menyuarakan pendidikan dan semangat untuk melawan praktik-praktik penjajahan. Selain itu itu filsafat pemikiran beliau juga yang sampai saat ini tertulis pada logo

Kementerian Pendidikan Nasional "Tut Wuri Handayani", kelima, KH. Hasyim Asy'ari, karena jasanya dalam pendidikan pesantren, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan terbesar dan tertua di tanah air.

Keenam, KH. Ahmad Dahlan adalah tokoh pergerakan, dan pendiri organisasi keagamaan Muhammadiyah yang banyak mewarnai pendidikan tanah air, ketujuh, RA Kartini, adalah seorang guru yang mendirikan sekolah di Rembang yang juga dikenang karena jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, kedelapan, Dewi Sartika, sama halnya dengan RA Kartini, Dewi Sartika sangat concern dalam membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendirikan Sekolah Istri (yang diperuntukkan kaum perempuan) yang

masih dipandang sebelah mata di masa penjajahan, kesembilan, Tan Malaka, merupakan sosok fenomenal melalui tulisan-tulisannya secara aktif mengkritisi segala bentuk penjajahan, diskriminasi dan penindasan ternyata ketika beliau kuliah di Belanda, ia mengambil jurusan keguruan, dan kesepuluh, Muhammad Hatta, merupakan wakil Presiden Pertama dikenal sebagai Bapak Koperasi.

Menurut Anita Lie, peran guru pada akhir abad ke-19 menjadi pelopor gerakan kebangkitan nasional dan mendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Guru mampu mencapai peran itu karena memiliki kapabilitas sebagai elite intelektual di masa itu melalui pendidikan yang bermutu tinggi.

Setelah 77 tahun merdeka, peran dan fungsi guru Indonesia mengalami situasi yang berbeda dan semakin kompleks. Menurut data Kemendikbudristek RI, pada tahun 2022 jumlah guru sebanyak 2.714.811 untuk mengajar lebih dari 44 juta peserta didik. Di tengah kompleksitas tugas guru, ternyata sampai saat ini

guru belum memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan guru sebagai pendidikan

profesional yang harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, salah satunya guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, tapi nyatanya sampai sekarang masih terdapat guru yang menerima honor tidak layak, ketidakjelasan status dan tidak memiliki jaminan sosial.

Komisi X DPR RI menyadari bahwa faktor yang cukup penting dan menentukan dalam menjamin mutu pendidikan adalah kualitas guru. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam

”

KOMISI X DPR RI MENYADARI BAHWA FAKTOR YANG CUKUP PENTING DAN MENENTUKAN DALAM MENJAMIN MUTU PENDIDIKAN ADALAH KUALITAS GURU.

mempersiapkan peserta didik (siswa) melalui kegiatan belajar-mengajar. Namun, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional mengajar dan tingkat kesejahteraannya.

Masalah yang terus mengemuka terkait guru adalah guru honorer. Upaya penyelesaian masalah tersebut diawali dengan Komisi X DPR RI pada Juli 2018 menginisiasi adanya rapat gabungan komisi untuk menyelesaikan tenaga honorer didalamnya termasuk guru honorer. Dalam rapat kerja Desember 2018, Pemerintah akan menyelesaikan status guru honorer ini melalui skema PPPK, pada tahun 2019.

Hingga periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, masalah tersebut belum tuntas. Kebijakan Pemerintah untuk memenuhi kekurangan guru melalui rekrutmen 1 juta Guru PPPK mendorong Komisi X DPR RI untuk mengawal kebijakan tersebut sambil menyelesaikan kejelasan status para guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraan dan jaminan sosial sebagai profesional.

Upaya yang dilakukan Komisi X DPR RI bersama Pemerintah memberikan kejelasan status kepegawaian dan kesejahteraan sebenarnya hanya merupakan salah satu upaya mendongkrak kualitas

pendidikan secara umum. Di luar kesejahteraan guru, masih ada aspek pendidikan yang perlu diperhatikan, seperti perbaikan sarana-prasarana, kualitas media dan sumber belajar, kualitas materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, dan lain sebagainya. Rangkaian kegiatan pengawasan terkait kebijakan Guru PPPK melalui beberapa panja yang dibentuk Komisi X DPR RI menjadi laporan utama majalah “Info KOM.X” edisi perdana pada bulan peringatan 77 tahun Indonesia merdeka.



Foto: GenPi

LAPORAN UTAMA

Guru Honorer, PR Kemerdekaan

Sebelum menulis laporan ini, redaksi meminta kepada staf Sekretariat Komisi X DPR RI untuk membuka daftar surat-surat permohonan audiensi dan langsung menyisir surat terkait permasalahan pendidikan. Penelusuran dimulai sejak tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022 ini. Hasilnya menunjukkan surat permohonan audiensi tersebut nyaris menghiasi setiap lembar data di Komisi X, dan mata semakin terbuka lebar ketika surat yang masuk diwarnai permasalahan guru honorer.

Secara sederhana, jika dikelompokkan surat yang masuk bersumber dari organisasi profesi guru, pemda atau dinas pendidikan, organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, perwakilan sekolah, sampai perkumpulan atau forum guru terkait honorer dengan variasi nama yang berbeda-beda. Khusus yang terakhir ini, redaksi ingin menyebutkan, diantaranya Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI), Forum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (FPHK2I), Forum Honorer Sekolah Negeri Gunung Kidul (FHSN), Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Ke Atas Bidang Tenaga Kependidikan (GTKHNK 35+ Tendik), dan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHLPGSI).

Perkumpulan dan forum tersebut hanya untuk menyebutkan sebagian kecil yang ada di data Komisi X, belum menghitung yang langsung datang ke Komisi X tanpa mengirimkan surat sebelumnya.

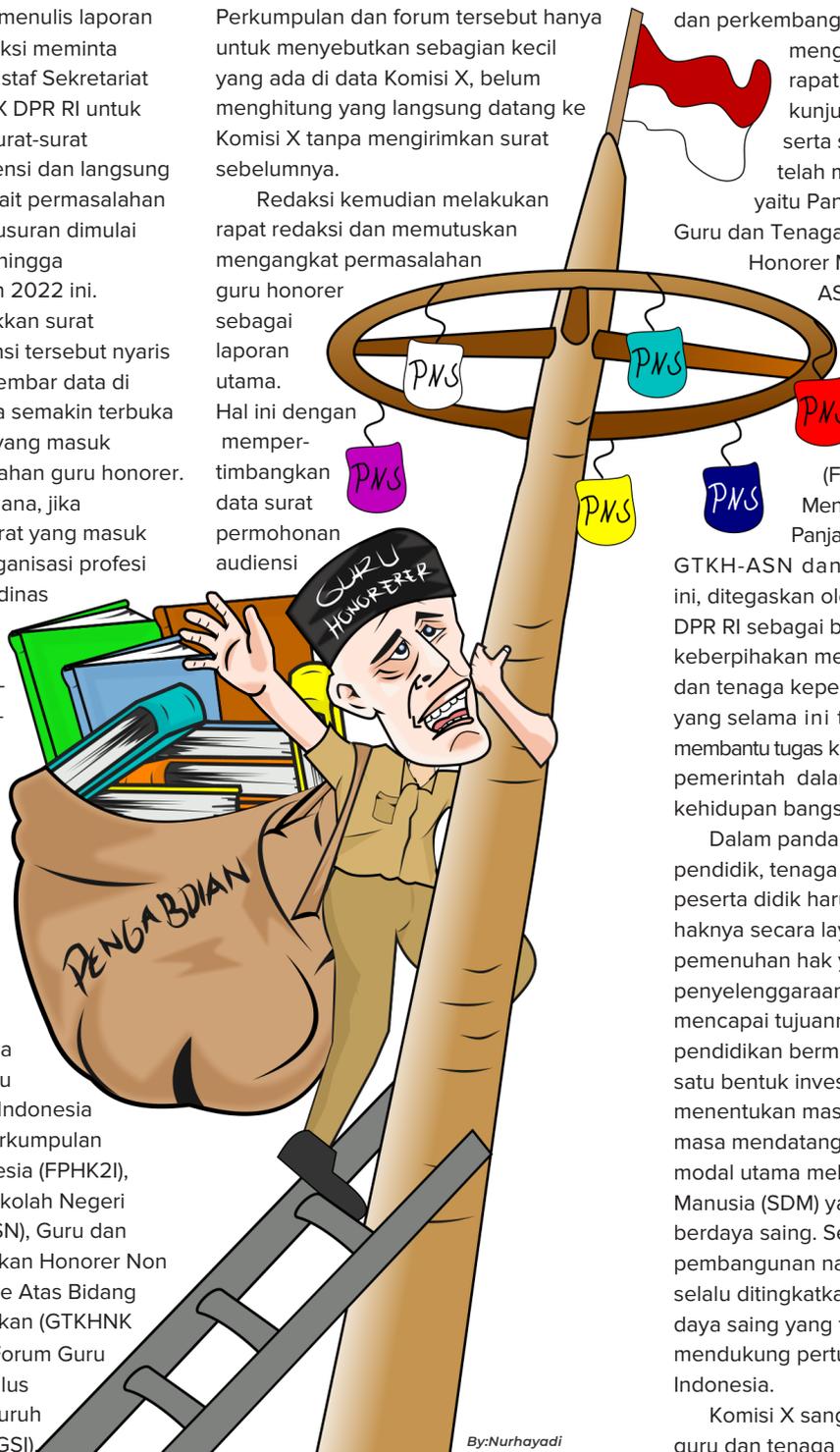
Redaksi kemudian melakukan rapat redaksi dan memutuskan mengangkat permasalahan guru honorer sebagai laporan utama. Hal ini dengan mempertimbangkan data surat permohonan audiensi

dan perkembangan isu yang terus mengemuka dalam rapat-rapat di komisi atau saat kunjungan kerja ke daerah, serta sikap Komisi X yang telah membentuk dua panja, yaitu Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN (PGTKH-ASN), dan Panja Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (FGTK-PPPK).

Mengenai pembentukan Panja Pengangkatan GTKH-ASN dan Formasi GTK-PPPK ini, ditegaskan oleh pimpinan Komisi X DPR RI sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan membela hak-hak guru dan tenaga kependidikan honorer yang selama ini telah nyata membantu tugas konstitusional pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam pandangan Komisi X, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik harus mendapatkan hak-haknya secara layak. Dengan pemenuhan hak yang layak maka penyelenggaraan pendidikan akan mencapai tujuannya. Selain itu, pendidikan bermutu merupakan salah satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa di masa mendatang, dan akan menjadi modal utama melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta berdaya saing. Sebagai modal utama pembangunan nasional, SDM harus selalu ditingkatkan agar memberikan daya saing yang tinggi guna mendukung pertumbuhan bangsa Indonesia.

Komisi X sangat memahami bahwa guru dan tenaga kependidikan



By:Nurhayadi



merupakan ujung tombak penyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berkarakter sesuai dengan jatidiri bangsa. Persaingan dunia yang semakin penuh tantangan dengan perubahannya yang dinamis menuntut SDM yang menjunjung tinggi kejujuran, mengedepankan nilai agama, moral, hukum dan berperadaban tinggi.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen sebenarnya telah memosisikan guru sebagai pendidik profesional, dimana tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Akan tetapi, adanya guru honorer yang berjumlah 742.459 (Kemendikbudristek, 18/1/2021), seolah menegaskan spirit undang-undang tersebut, karena guru honorer tidak diperlakukan secara layak, khususnya dalam hal karir dan pemenuhan kesejahteraan.

Rendahnya kesejahteraan GTK Honorer kemudian menyebabkan munculnya tuntutan agar diberi perhatian oleh pemerintah. Penyelesaian dengan skema pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN yang ditawarkan pemerintah saat ini masih menemukan berbagai kendala dan permasalahan, termasuk penolakan tes seleksi untuk dapat diangkat menjadi PPPK. Selain itu, sebanyak 34.954 THK-II yang lulus seleksi pada 2019 juga masih belum memperoleh SK untuk dapat menerima gaji dan tunjangan, padahal telah terbit Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini mencerminkan beberapa ungkapan yang muncul dalam audiensi ‘guru honorer’ dibutuhkan tapi sering dilupakan’.

Melalui panja Pengangkatan GTKH-ASN, yang dibentuk tanggal 26 Januari 2021 dan telah bekerja sampai



KOMISI X SANGAT MEMAHAMI BAHWA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MERUPAKAN UJUNG TOMBAK PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENCIPTAKAN SDM YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER SESUAI DENGAN JATIDIRI BANGSA.



Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Barat VII

menimbulkan kegaduhan dalam hal informasi yang disampaikan Panselnas, afirmasi yang belum ada keberpihakan kepada guru yang telah lama mengabdikan, dan permasalahan yang paling krusial yaitu ketidakpastian alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru yang lulus seleksi PPPK.

Mengenai ketidakpastian anggaran ini, Komisi X banyak menerima pengaduan bukan hanya dari guru honorer melainkan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam forum RDP panja Pengangkatan GTKH-ASN, beberapa pemda kabupaten/kota yang diundang dan menyampaikan permasalahan ini antara lain, Cianjur,

tanggal 31 Agustus 2021 panja ini telah melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimaksud yaitu RDP dengan pakar; RDP dengan Pemda provinsi dan kabupaten/kota; RDP dengan pejabat eselon I Kemenag RI, Kemendikbudristek RI, Kemenkeu RI, Bappenas RI, Kemendagri RI, Kemenpan RB RI, dan BPKP RI; Forum Rektor; dan organisasi profesi guru.

Secara umum panja ini berkesimpulan program satu juta guru PPPK belum dilakukan melalui proses perencanaan yang maksimal, sehingga tidak mampu mengantisipasi permasalahan krusial. Permasalahan yang masih terus mengemuka antara lain sosialisasi kebijakan yang belum maksimal, proses seleksi yang

Banyumas, Pasuruan, Kutai Kartanegara, Landak, Bengkulu Selatan. Adapun pemda provinsi yaitu Kalimantan Timur, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Ketidakpastian anggaran ini menjadi fokus yang terus dipertajam Komisi X dalam rapat-rapat selanjutnya, karena berimplikasi kepada banyak hal, antara lain tidak terpenuhinya kuota formasi PPPK. Kritik tajam dari pemda terutama terkait anggaran gaji PPPK yang dikhawatirkan membebani APBD, meskipun diinformasikan bahwa semuanya bersumber dari APBN. Hal ini disebabkan tidak jelasnya anggaran melalui skema DAU. Bahkan pemda

mengakui bahwa dalam DAU nya tidak ada penambahan untuk gaji dan tunjangan guru yang lulus PPPK.

Panja Pengangkatan GTKH-ASN kemudian merumuskan rekomendasi, diantara yang penting untuk ditekankan yaitu rekomendasi mengenai anggaran. Beberapa rekomendasi yang dimaksud, yaitu 1) mendesak pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam hal penataan GTK Honorer, mulai dari proses pengangkatan sampai pengaturan mengenai gaji, penghargaan, dan jaminan sosial serta kesejahteraan-annya; 2) mendesak Kemendikbudristek, Kemen-dagri dan Kemenkeu agar menerbitkan peraturan mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang anggarannya bersumber dari APBN diperhitungkan melalui DAU dan ditransfer kepada pemerintah daerah, untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah yang belum mengusulkan atau pemerintah daerah yang usulannya belum memenuhi kuota formasi seleksi guru PPPK tahun 2021; 3) mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi baik berupa Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden atau peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan skema penganggaran untuk guru PPPK serta proses

seleksinya secara jelas dan tegas.

Mengingat permasalahan guru honorer masih terus menjadi perhatian publik, utamanya kegelisahan para guru honorer yang belum mendapatkan formasi dan kebingungan kepala daerah terkait kepastian anggaran, Komisi X pada tanggal 15 Maret 2022 membentuk Panja Formasi GTK-PPPK. Panja ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi guru PPPK 2021, khususnya permasalahan formasi, karena di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, Komisi X mendapatkan banyak pengaduan mengenai guru mata pelajaran yang belum masuk formasi PPPK, seperti guru PJOK, guru seni, dan guru PAI. Selain itu, ada juga pengaduan dan tuntutan agar tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi guru PPPK.

Dalam kinerjanya, panja Formasi GTK-PPPK mengundang eselon I Kemendikbudristek/dikti, Kemenag, Kemenkeu, Kemendagri, KemenPAN-RB, BKN, Bupati/Walikota (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pasuruan, Lampung Timur, Kota Kupang, Kabupaten Sanggau), Gubernur/Wakil Gubernur (DIY, Sulawesi Barat, NTB, Kaltara), serta kunjungan ke kabupaten/kota (Langkat, Makasar dan Banjarmasin).

”

PANJA JUGA BERKESIMPULAN, AKIBAT DARI KETIDAKPASTIAN ANGGARAN BERIMPLIKASI KEPADA PEMDA KABUPATEN/KOTA MEMBUAT KEBIJAKAN YANG BERVARIASI,

Agustina Wilujeng P.,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Fraksi PDI-P Dapil
Jawa Tengah IV

Dalam kegiatan yang dilakukan panja, selain masalah formasi dan anggaran ditemukan permasalahan baru, yaitu adanya protes dan tuntutan dari penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Guru dari sekolah swasta yang lulus seleksi dan mengisi formasi di sekolah negeri membuat sekolah swasta kehilangan guru berkualitas, dengan rincian sejumlah 41.619 mendapatkan formasi dan 58.749 tidak mendapatkan formasi. Dari jumlah yang tidak mendapatkan formasi tersebut sudah meninggalkan sekolah asalnya dengan status menunggu dibukanya seleksi tahap III.

Hasi kerja Panja Formasi GTK-PPPK berkesimpulan bahwa seleksi tahap I dan tahap II belum memenuhi jumlah formasi yang dibutuhkan, karena hanya 293.860 yang lulus. Dari jumlah tersebut, SK pengangkatan PPPK yang telah selesai pada tahap I sebanyak 47.921 (35 %), dan pada tahap II sebanyak 12.484 (25 %). Dengan demikian, total yang mendapatkan SK pengangkatan sejumlah 60.405 (20 %), akan tetapi dengan masa berlaku yang bervariasi. Panja juga berkesimpulan, akibat dari ketidakpastian anggaran berimplikasi kepada pemda provinsi dan kabupaten/kota membuat kebijakan yang bervariasi, antara lain ada yang mengalokasikan gaji dan tunjangan guru PPPK secara penuh selama 14 bulan; ada yang mengalokasikan gaji dan tunjangan guru PPPK hanya beberapa bulan saja; ada yang mengalokasikan hanya gaji tanpa tunjangan guru PPPK; dan akan mengalokasikan gaji dan tunjangan guru PPPK namun menunggu tambahan DAU, dengan kata lain tidak mengalokasikan.

Dari hasil kinerja panja dan kesimpulan yang dirumuskan, panja memberikan rekomendasi agar Kemendikbudristek bersama Panselnas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap permasalahan dan kendala selama proses seleksi tahap I dan tahap II pada tahun 2021, khususnya dalam hal kebijakan dan mekanisme anggaran melalui skema DAU, dan kebijakan pengusulan serta penetapan formasi, serta memastikan





Ketua Komisi X Syaiful Huda menerima audiensi Bersama Pimpinan Guru Honorer foto: FGHNLPSI for JPNN.com

permasalahan yang terjadi pada tahap I dan tahap II tahun 2021 tidak terulang kembali. Panja juga merekomendasikan Kemenkeu memberikan juklak dan juknis yang jelas bagi pemerintah daerah mengenai realisasi alokasi anggaran gaji guru yang lulus seleksi PPPK melalui skema DAU yang earmarked, agar tidak terjadi salah tafsir dalam implementasinya dan menghilangkan kekhawatiran pemda. Selain itu, Kemendikbudristek RI juga diminta berkoordinasi dengan Panselnas PPPK untuk melakukan evaluasi agar seleksi guru PPPK diserahkan kepada pemda atau dibuat sistem klaster berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah (3T dan lain-lain).

Mengenai permasalahan guru honorer ini, Ketua komisi X, Syaiful Huda menegaskan bahwa program seleksi 1 juta PPPK, hanya solusi jangka pendek dan bukanlah solusi utama untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Oleh karena itu, Syaiful Huda mendesak pemerintah untuk tetap membuka pintu PNS bagi para guru honorer. Wakil Ketua Komisi X, Agustina Wilujeng menyampaikan program



KOMISI X DPR RI BERKOMITMEN UNTUK MENGUPAYAKAN YANG TERBAIK GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA GURU HONORER MELALUI REGULASI YANG TEPAT DAN BERPIHAK KEPADA PEMENUHAN HAK-HAK GURU

pengangkatan PPPK di kalangan guru menimbulkan kecemburuan, khususnya kepada para guru yang tidak lulus ujian, terkait dengan kesejahteraannya. Sementara Hetifah selaku Wakil Ketua Komisi X memintapemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek bersungguhsungguh menyelesaikan permasalahan guru honorer. Dalam

beberapa rapat, Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi X juga menegaskan agar Kemendikbudristek melihat dan mengidentifikasi permasalahan dilapangan agar kebijakannya tidak melahirkan permasalahan baru. Hampir senada, Wakil ketua Komisi X, Abdul Fikri Fakhri, mengingatkan pemerintah agar memprioritas dan menyelesaikan permasalahan sisa tenaga honorer K2. Terkait permasalahan guru honorer ini, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik guna meningkatkan kesejahteraan para guru honorer melalui regulasi yang tepat dan berpihak kepada pemenuhan hak-hak guru. Untuk guru yang tidak lulus PPPK tetap harus dipikirkan dan diberikan solusi karena mereka pernah mengajar dan berkontribusi nyata mendidik generasi bangsa. Komisi X ingin menyaksikan para guru honorer tersenyum seiring kibaran merah putih di seluruh pelosok negeri dalam rangka 77 tahun Indonesia merdeka, seraya mengajak pemerintah untuk memberikan solusi terbaik dan berkeadilan.

Penghapusan Rekrutmen CPNS Guru, Dede Yusuf: Khianati Perjuangan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengaku kaget dengan kabar bahwa pemerintah memutuskan menghentikan rekrutmen CPNS guru mulai 2021 dan menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Padahal, keputusan ini juga tidak pernah disinggung dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

"Ini berita agak mengagetkan kita, karena beberapa waktu lalu Mendikbud bersama dengan Komisi X sudah menyetujui bahwa membuka pendaftaran PPPK guru sebanyak 1 juta orang, sementara untuk CPNS tetap, karena sebenarnya CPNS adalah sesuatu yang dibutuhkan pemerintah. Dikarenakan setiap tahun ada yang pensiun, setiap tahun selalu ada yang tidak bisa meneruskan tugasnya," kata Dede saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa jumlah guru PNS ini tidak cukup banyak, bahkan rata-ratanya hanya 1-2 orang guru PNS di setiap sekolahnya dan sisanya merupakan guru honorer. Meskipun Komisi X DPR sepakat untuk merekrut guru honorer menjadi PPPK, rekrutmen CPNS guru harus tetap ada.

"Memang kesepakatan kita dalam beberapa kali rapat itu honorer akan diganti menjadi PPPK tetapi, CPNS masih ada," ujarnya.

Menurut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, kalau tiba-tiba pemerintah menghapus rekrutmen PNS untuk guru, tentu saja kebijakan ini sangat diskriminatif dan seolah-olah guru tidak boleh menjadi PNS, padahal guru-guru ini sudah lama mengabdikan. "Padahal guru sudah mengabdikan lama, mereka sudah bertugas. Jadi menurut hemat kami ini adalah sesuatu yang benar-benar mengkhianati perjuangan para guru," kata Dede. Ia menegaskan bahwa PPPK perlu ada untuk mengganti posisi tenaga pengajar honorer.

Namun, dengan kebijakan sekarang bahwa seluruh posisi

untuk CPNS dicabut untuk guru, selain pemerintah diskriminatif, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghargai jasa para guru. Karena itu, Dede menambahkan, persoalan ini akan dibahas segera dalam agenda rapat Komisi X dengan Mendikbud di masa sidang pekan depan. Karena hal ini tidak pernah disinggung sama sekali oleh Mendikbud. "Itu yang membuat kami sangat terkejut, ya begitu kita masuk ini akan menjadi agenda pertama yang kita diskusikan dengan para menteri adalah hal seperti ini, termasuk masalah tatap muka dan lain sebagainya," ujar Dede.

”

**KOMISI X DPR
SEPAKAT UNTUK
MEREKRUT GURU
HONORER
MENJADI P3K,
REKRUTMEN CPNS
GURU HARUS
TETAP ADA**

Dr. Dede Yusuf
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Fraksi Partai Demokrat
Dapil Jawa Barat II



Pengangkatan PPPK Timbulkan Kecemburuan pada Guru yang Tidak Lulus

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng menyampaikan program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kalangan guru menimbulkan kecemburuan, khususnya kepada para guru yang tidak lulus ujian, terkait dengan kesejahteraannya. Ia menegaskan, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengupayakan yang terbaik guna meningkatkan kesejahteraan para guru.

“Kami berjuang untuk bagaimana pemerintah pusat melalui dana pendidikan 20 persen dari APBN itu memberikan kesejahteraan untuk guru yang tidak lolos PPPK tetap harus dipikirkan karena mereka pernah mengajar hari ini dalam pengelolaan yang saat ini kan masih banyak guru yang tadi belum dapat,” ujar Agustina usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6/2022).

Meski demikian, ia mengapresiasi upaya yang dilakukan Bupati Deli Serdang dan jajarannya yang hingga saat ini menanggung kesejahteraan guru yang belum lolos PPPK dengan menyisihkan dana APBD, BOS ataupun lainnya. “Bagaimana itu diproses ketika APBD-nya enggak cukup? Ketua tim PKK itu pasti mengambil dana dari masyarakat. Tim penggerak PKK diminta untuk ikut mencari, bagaimana program pendidikan yang di luar sekolah dasar dan sekolah menengah yang formal, yang apa namanya reguler itu bisa tetap berjalan. Ini luar biasa,” apresiasi Agustina.

Kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut menghasilkan

beberapa catatan yang perlu untuk ditindaklanjuti seperti kesejahteraan guru PPPK dan implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP). Agustina menilai, beberapa program yang digagas Mendikbud Ristek tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan para guru.

“Kita ke Deli Serdang melihat dari dekat proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar di SD dan



BEBERAPA PROGRAM MENDIKBUD RISTEK MENIMBULKAN KECEMBURUAN DI KALANGAN PARA GURU

Agustina Wilujeng Pramestuti,
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Fraksi PDI-P Dapil Jawa Tengah IV

SMP sambil bertemu dengan seluruh stakeholder. Nah dari sini kita melihat bahwa program guru penggerak dan sekolah penggerak ternyata membuat kecemburuan yang luar biasa ini yang mungkin harus dipikirkan oleh kawan-kawan di Kemendikbud ada pemikiran kembali,” lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Agustina pun berharap, implementasi dari kebijakan sekolah penggerak tidak pilih pilih sekolah dengan membuka keran seluas luasnya bagi semua sekolah yang hendak berpartisipasi, terlebih dana yang dianggarkan pemerintah untuk itu cukup besar, sehingga sekolah sekolah yang siap namun membutuhkan dana berkesempatan iuga untuk mendapat bantuan tersebut.

“Mudah-mudahan pemerintah lebih konsen kepada amanat untuk program wajib belajar 9 tahun & mengalokasikan

20 persen APBN yang tahun ini ada Rp627 triliun itu lebih kepada menyelesaikan wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak di usia sebelum 17 tahun,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV ini.

Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2



tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Kemendikbudristek pun telah membuka pendaftaran untuk kepala sekolah di provinsi dan kabupaten/kota yang telah terpilih untuk menyelenggarakan program Sekolah Penggerak. Kepala sekolah yang mendaftar akan diseleksi untuk kemudian ditetapkan oleh tim panelis.

Adapun keuntungan ketika menjadi sekolah penggerak yakni peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, percepatan digitalisasi sekolah, kesempatan menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, percepatan pencapaian profil pelajar pancasila, mendapatkan pendampingan intensif, serta memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru.

Terkait Rekrutmen Guru PPPK, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda : Koordinasi Belum Efektif

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan rekrutmen guru PPPK koordinasinya belum efektif, hal itu dikatakannya saat Raker dengan Mendikbudristek Nadim Makariem di Senayan Jakarta, Selasa 12 April 2022.

Syaiful Huda menambahkan, belum efektifnya koordinasi terlihat dalam hal alokasi anggaran rekrutmen dan agenda rekrutmen satu juta guru P3K.

"Agenda rekrutmen satu juta guru PPPK baru terisi 17 persen. Pemerintah pusat dan daerah perlu koordinasi lebih efektif lagi kedepan," kata Syaiful Huda dikutip dari laman resmi DPR RI.

Bahkan Syaiful Huda mengatakan perekrutan guru PPPK menjadi konsen Komisi X, bahkan sampai membentuk Panitia Kerja (Panja).

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan rekrutmen guru PPPK koordinasinya belum efektif, hal itu dikatakannya saat Raker dengan Mendikbudristek Nadim Makariem di Senayan Jakarta, Selasa 12 April 2022.

Syaiful Huda menambahkan, belum efektifnya koordinasi terlihat dalam hal alokasi anggaran rekrutmen dan agenda rekrutmen satu juta guru P3K. "Agenda rekrutmen satu juta guru PPPK baru terisi 17 persen. Pemerintah pusat dan daerah perlu koordinasi lebih efektif lagi kedepan," kata Syaiful

Huda dikutip dari laman resmi DPR RI. Bahkan Syaiful Huda mengatakan perekrutan guru PPPK menjadi konsen Komisi X, bahkan sampai membentuk Panitia Kerja (Panja).

"Bila koordinasi dilakukan efektif, kami meyakini rekrutmen satu juta guru PPPK akan tuntas pada tahun 2022," tegasnya

Permasalahan lainnya, dikatakan Syaiful Huda adalah pemerintah



PERLU KOORDINASI LEBIH EFEKTIF LAGI KEDEPAN, BILA KOORDINASI DILAKUKAN EFEKTIF, KAMI MEYAKINI REKRUTMEN SATU JUTA GURU PPPK AKAN TUNTAS PADA TAHUN 2022

Syaiful Huda,
Ketua Komisi X DPR RI
Fraksi PKB Dapil Jawa Barat VII

daerah belum yakin sepenuhnya dengan rekrutmen guru PPPK. "Pengalokasian anggaran rekrutmen dititipkan melalui Dana Alokasi Umum, bukan Dana Alokasi Khusus," terang Syaiful Huda. Lanjutnya, pemerintah daerah menginginkan anggaran perekrutan dan gaji PPPK melalui DAK. "Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri masih kurang koordinatif

mendukung agenda rekrutmen satu juta guru PPPK," katanya.

Syaiful Huda juga menyampaikan bahwa karena hal tersebut maka Pemda gamang dalam merekrut tenaga guru PPPK. "Pemda menginginkan skema anggaran melalui DAK bukan DAU. Kalau DAU Pemda belum yakin sepenuhnya, itulah mengapa Pemda belum mengajukan SK seleksi tahap I dan II," tutupnya.



Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Menyerahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Foto: Yoga/nvl

Mengupayakan Kesejahteraan Psikologis Masyarakat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi sah menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR, pada Kamis (7/7). Pengesahan ini merupakan capaian kedua Komisi X DPR RI di bidang legislasi, setelah pada Selasa (15/2) RUU tentang Keolahragaan disahkan sebagai UU. Sehingga pada tahun ketiga periode 2019-2024, Komisi X DPR RI telah menyelesaikan dua undang-undang.

“Kesejahteraan psikologis masyarakat” merupakan salah satu urgensi perlunya pengaturan pendidikan dan layanan psikologi dalam satu undang-undang. Panja Komisi X DPR RI memerlukan waktu satu masa sidang untuk menemukan dan menyepakati urgensi dari undang-undang ini. Panja memandang penting untuk melakukan rapat dengan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan psikologi maupun layanan psikologi termasuk melakukan kunjungan ke Kampus UNPAD, UGM dan Brawijaya, mengingat RUU yang semula berjudul Praktik Psikologi merupakan RUU penugasan Pimpinan DPR RI kepada Komisi X DPR RI. Rapat yang cukup itens

tersebut juga menyepakati bahwa RUU ini bertujuan mengatur dan mengikat kepentingan masyarakat luas dengan segala karakteristiknya, maka substansi RUU tentang Praktik Psikologi akan mengatur dari hulu ke hilir mulai dari aspek pendidikan, aspek keprofesian, dan aspek layanan.

Perubahan substansi yang sangat mendasar menjadi dasar pertimbangan Panja untuk mengubah judul RUU menjadi RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Selain meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat, UU ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi, daya saing SDM, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Psikolog, Klien, serta masyarakat.

Substansi Undang-Undang

Pada sambutan mengawali disahkannya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, Ketua Panja RUU Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa pokok pengaturan dan norma UU ini adalah, Pertama, substansi pendidikan dalam UU Pendidikan dan Layanan Psikologi tidak mengatur secara khusus (*lex specialis*) penyelenggaraan pendidikan psikologi. Seluruh penyelenggaraan pendidikan psikologi baik program akademik maupun profesi tunduk pada UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengaturan pendidikan dalam UU Pendidikan dan Layanan Psikologi merupakan pembenahan dan penguatan terhadap penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi yang

ada saat ini. Kondisi saat ini penyelenggaraan pendidikan profesi melalui program magister profesi. (Magister merupakan program akademik, dengan kata lain saat ini belum ada penyelenggaraan pendidikan profesi psikologi). Kedua, memberikan penegasan dan penguatan terhadap penyelenggaraan pendidikan profesi hanya dapat diikuti oleh sarjana psikologi melalui program profesi yang akan menghasilkan lulusan Psikolog Umum, program spesialis yang akan menghasilkan lulusan Psikolog Spesialis, dan program subspecialis yang akan menghasilkan Psikolog Subspesialis. Ketiga, memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat dengan berbagai permasalahan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya dengan menyediakan program spesialis dan subspecialis pada penyelenggaraan pendidikan profesi. Sehingga lulusan pendidikan profesi psikologi tidak hanya Psikolog Umum, namun akan tersedia Psikolog Spesialis dan Psikolog Subspesialis. Keempat, UU ini juga menguatkan penyelenggaraan pendidikan akademik, dengan membuka kesempatan bagi lulusan sarjana, sarjana terapan, magister, dan magister



Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, menyampaikan sambutan Foto: Yoga/nvl

terapan dari berbagai bidang studi. Pengaturan ini diharapkan akan memperkuat dan memperkaya keilmuan psikologi sehingga menghasilkan ilmuwan psikologi yang mendukung pengembangan keilmuan psikologi dan layanan psikologi.

Kelima, UU ini memberikan pengaturan dan kepastian adanya kerja sama perguruan tinggi dan organisasi profesi, dimana keduanya memiliki tanggung jawab mulai dari proses pendidikan profesi sampai dengan lulusan mendapatkan pengakuan atas kompetensinya sebagai psikolog. Pengaturan ini penting, mengingat kerja sama perguruan tinggi dan organisasi profesi akan mutu layanan profesi psikolog.

Keenam, UU ini menata dan memberikan kepastian proses serta tahapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi, baik psikolog yang berpraktek memberikan layanan maupun psikolog sebagai ilmuwan. Hal ini diharapkan akan berdampak secara langsung terhadap layanan psikologi yang optimal.

Ketujuh, UU ini memberikan kepastian pengaturan kepada psikolog untuk memiliki STR dan mendapatkan SILP, dimana STR dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi dan SILP diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan psikologi.

Kedelapan, psikolog lulusan luar negeri dan psikolog asing diberikan kepastian pengaturan dalam memberikan layanan setelah psikolog tersebut memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat ijin layanan



UU INI MEMBERIKAN JAWABAN TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI PERMASALAHAN PSIKOLOGIS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGISNYA

psikologi (SILP).

Kesembilan, UU ini memberikan jaminan mutu layanan psikologi yang akan dilakukan oleh Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis melalui pemberian kewenangan sekaligus mencerminkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing profesi psikolog.

Kesepuluh, Untuk menjaga kompetensi Psikolog, UU ini mengatur bahwa Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) harus diperpanjang oleh Psikolog yang masih akan memberikan layanan psikologi. Perpanjangan SILP dilakukan melalui asesmen yang diselenggarakan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi dengan melibatkan asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi di Indonesia, dan asosiasi atau ikatan bidang keilmuan serta rumpun layanan.



Kesebelas, UU ini memberikan perlindungan Psikolog dan Klien, melalui pengaturan bahwa setiap layanan psikologi harus didasari adanya persetujuan antara Klien dan Psikolog baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan standar layanan psikologi.

Keduabelas, untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan bidang psikologi, UU ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan kepada induk organisasi profesi himpunan Psikologi sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada Psikolog berkoordinasi dengan induk organisasi profesi himpunan Psikologi.

Dinamika Pembahasan

Setiap pembahasan RUU akan diwarnai berbagai dinamika dan perdebatan, tak terkecuali pembahasan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Susbtansi krusial mengenai STR yang semula telah disepakati pengaturan registrasi sekaligus berfungsi sebagai izin Rapat Timus/Timsin tetap dilanjutkan untuk menyelesaikan hal-hal

yang ditugaskan Panja. Setelah tugas Timus/Timsin selesai, maka rapat diskors untuk dilakukan lobi terkait usulan Panja Pemerintah tersebut.

Mengingat substansi pemisahan registrasi dan izin praktik psikologi akan berdampak perubahan yang fundamental dari kondisi eksisting penyelenggaraan layanan psikologi saat ini, dimana organisasi profesi (HIMPSI) adalah lembaga yang melakukan registrasi dan menerbitkan surat izin praktik; maka salah satu Pimpinan Komisi X DPR RI Dede Yusuf menginisiasi lobi dengan mengundang Ketua Umum HIMPSI Seger Handoyo. Senin malam (27/6) itu juga, Ketua Umum HIMPSI terbang dari Surabaya menuju Jakarta.



LAYANAN PSIKOLOGI HARUS DIDASARI ADANYA PERSETUJUAN ANTARA KLIEN DAN PSIKOLOG BAIK SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS

Pukul 20.00WIB, lobi dihadiri oleh unsur Pimpinan Komisi X DPR RI Dede Yusuf, Ketua Panja DPR RI Hetifah Sjaifudian, Ketua Panja Pemerintah Anindito Aditomo, Irjen Kemendikbudristek Chatarina Girsang, Dir Harmonisasi PUU I Kemenkumham Roberia, Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Kemenkes H. Muhammad Budi Hidayat, dan beberapa anggota Panja Komisi X DPR RI.

Lobi berjalan cukup lancar, dan Ketua Umum HIMPSI sepakat menerima substansi pemisahan pengaturan registrasi dan surat izin. Pemerintah

Pusat yang akan menerbitkan surat izin praktik melalui rekomendasi organisasi profesi. Pembahasan dilanjutkan dalam bentuk rapat Panja pada tanggal 29 Juni 2022 dan selanjutnya RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi akan diputuskan pada pembicaraan tingkat I dalam Rapat Kerja tanggal 30 Juni 2022.

Seluruh Fraksi dan Pemerintah menerima dan menyetujui RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi teruskan dalam Pembicaraan Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

Pada Sidang Paripurna, Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembahasan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Dengan disahkan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Psikolog, Klien, serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan psikologi. Selain itu, Mas Menteri juga mengingatkan bahwa diperlukan kerja sama yang aktif dari pemangku kepentingan psikologi untuk segera menyusun peraturan pelaksana dari UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, sehingga UU dapat segera dilaksanakan secara komprehensif.





Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Dede Yusuf, ME., S.T., M.I.Pol menyerahkan RUU Keolahragaan Foto: Yoga/nvl

Upaya Memaksimalkan Potensi Olahraga

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Keolahragaan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR yang digelar di gedung Nusantara II, Selasa (15/2). UU Keolahragaan merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Dalam pembahasannya, rapat Panja sempat mengalami beberapakali deadlock.

Pada sambutan mengawali disahkannya RUU Keolahragaan, Ketua Panja RUU Keolahragaan Dede Yusuf, menyampaikan bahwa capaian prestasi olahraga di tingkat internasional adalah barometer kemampuan negara dalam memajukan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya dapat dicapai jika falsafah sport for all (olahraga untuk semua) dapat diterapkan.

Menurut Dede Yusuf, banyak bergerak dan melakukan aktivitas, dapat mencegah orang kelebihan berat badan dan mengurangi risiko penyakit. "Pengesahan RUU Keolahragaan mendapat momentum yang tepat, dimana setiap orang diharapkan mampu menjaga kesehatan di era pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.

Revisi UU SKN diinisiasi oleh Komisi

X DPR RI dan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional sejak tahun 2019. Penyusunan Draf RUU oleh Komisi X DPR RI, diawali dari pembentukan Panja, dan melakukan berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan. Panja telah melakukan lebih dari 13 kali RDP/RDPU dengan narasumber rata-rata 3-5 orang dalam satu kali pertemuan. Dari berbagai pertemuan, beberapa isu penting yang perlu diperbaiki yaitu model pengelolaan Olahraga, ruang lingkup olahraga, penataan lembaga keolahragaan, pendanaan, industri olahraga dan pajak olahraga, dan infrastruktur olahraga, dan kesejahteraan pelaku olahraga. Beberapa hal lain juga perlu disesuaikan, misalnya terkait dengan olahraga penyandang disabilitas.

Pembicaraan Tingkat I bersama Pemerintah, secara resmi mulai dilakukan pada 13 September 2021.

Dalam Rapat Kerja, disepakati 861 DIM yang harus dibahas. Panja menyusun strategi pembahasan dilakukan dengan metode kluster isu krusial mayor dan minor. Isu mayor yang mengemuka adalah terkait (1) ruang lingkup olahraga, (2) olahraga berbasis teknologi, (3) big data olahraga, (4) industri olahraga, (5) olahragawan sebagai profesi, (6) jaminan sosial, (7) penghargaan olahraga, (8) sumbangan badan usaha/CSR, (9) dana langsung ke cabor, (10) kelembagaan sengketa (BAKI dan BAORI), (11) anti-doping dan lembaga antidoping, (12) pendanaan olahraga, (13) kelembagaan KONI dan KOI, dan (14) suporter.

Sementara isu minor yang dibahas adalah (1) tujuan keolahragaan nasional, pelatih olahraga, (3) tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, (4) sarana dan prasarana (infrastruktur), (5) olahraga penyandang disabilitas, (6) naturalisasi atlet, dan



Panja RUU menyerahkan RUU Keolahragaan

(7) desain besar olahraga nasional. Dari isu krusial tersebut, Panja melaksanakan berbagai kegiatan termasuk uji publik pada 6-12 Desember 2021 ke Semarang, Makasar, Medan, Pekanbaru, Denpasar, dan Mataram.

Substansi Perubahan

Pokok bahasan dan norma substansi perubahan RUU, sebagaimana disampaikan Dede Yusuf adalah, pertama penguatan olahraga sebagai bagian dari SDGs. RUU ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan, dan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

“Perubahan nomenklatur olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat menjadi penanda untuk mewakili semangat dan perubahan tersebut,” ungkapnya.

Kedua, penguatan olahragawan sebagai profesi, dan pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaan, dilakukan bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, dan kewarganegaraan,



KONI MEMILIKI KEWENANGAN MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA KOI UNTUK MENGIRIM ATLET KE AJANG INTERNASIONAL

melainkan juga perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Ketiga, RUU Keolahragaan mengatur dana perwalian keolahragaan, yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga non-pemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga. Selain itu, terdapat bantuan dana olahraga langsung kepada cabang olahraga untuk pengurus olahraga tingkat pusat. Adapun untuk pengurus daerah daerah, bantuan dana dapat melalui

KONI atau langsung ke cabang olahraga melalui hibah.

Keempat, terdapat pengaturan yang jelas mengenai tugas, kewenangan, dan sinergitas KONI-KOI. KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada KOI untuk mengirim atlet ke ajang internasional, dan KOI harus melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik diantara kedua lembaga tersebut.

Kelima, RUU ini mengatur desain besar olahraga nasional untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan bertaraf nasional dan/atau internasional.

Keenam, diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan supporter, antara lain dalam bentuk perlindungan hukum dan prioritas untuk menjadi bagian dari pemilik klub. Ketujuh, terdapat pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital/elektronik, namun tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial. Hal ini didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga. Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik harus diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan.

Kedelapan, dibentuk sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga Nasional, yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga. Kesembilan, diatur dan ditegaskan adanya 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat. Dalam hal mediasi dan konsiliasi, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi. Kesepuluh, RUU ini diselaraskan dengan UU Penyandang Disabilitas. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Dinamika Pembahasan

Pembahasan RUU Perubahan UU SKN diiringi beberapa dinamika dan perdebatan, antara lain mengenai kelembagaan KONI-KOI, pendanaan (mandatory spending), olahraga berbasis teknologi (IT Based Sport), Suporter, Jaminan Sosial, dan sarpras olahraga di Kawasan industri. Beberapa isu tersebut bahkan ada yang mengalami deadlock, sehingga dilakukan lobi. Dalam hal kelembagaan KONI-KOI misalnya, beberapa fraksi DPR sempat bersikukuh untuk menyatukan kedua lembaga dalam satu manajemen mengingat tuduhan keterpurukan prestasi olahraga nasional adalah akibat ketidakkompakan kedua lembaga ini. Adanya KONI dan KOI

memunculkan dua lembaga arbitrase olahraga, dualisme beberapa cabang olahraga, dan kegagalan manajemen olahraga secara keseluruhan. Beberapa fraksi DPR RI, seperti PKS, Nasdem, dan lain-lain, menolak usul Pemerintah yang mempertahankan kedua lembaga sebagaimana saat ini.

Cabor,” demikian disampaikan Juru Bicara Pemerintah Jonni Mardizal selaku Pj. Sesmenpora.

Menurut Dede Yusuf, “perbedaan tersebut terjadi karena adanya semangat bersama untuk memperbaiki kemajuan olahraga di Indonesia”. Akhirnya, melalui kompromi politik yang panjang, pemerintah



Penandatanganan RUU Keolahragaan oleh Ketua Panja dan Menpora RI

” MENPORA RI ZAINUDIN AMALI MENGAPRESIASI SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBAHASAN RUU KEOLAHRAGAAN

Pemerintah dan KOI/NOC mempertahankan eksistensi kedua lembaga karena kehadiran mereka tidak didasarkan pada regulasi yang sama. KOI/NOC wajib independen karena merupakan wakil dari IOC di Indonesia yang dilegitimasi oleh Olympic Charter, sementara KONI adalah komite olahraga yang didukung oleh regulasi negara. “Keduanya tidak mungkin dilebur meskipun dapat dipimpin oleh satu orang yang sama yang dipilih secara konstitusional oleh

dan DPR tetap menyepakati eksistensi kedua lembaga dengan mempertegas dan memperjelas kewenangan keduanya. Pembahasan dilanjutkan dalam bentuk Rapat Panja sampai Rapat Timmus/Timsin. Dalam rapat Panja tanggal 14 Februari 2022 pagi, akhirnya disepakati draft RUU tentang Keolahragaan sebagai hasil Panja. Pada hari yang sama, kesepakatan tersebut dibawa ke rapat intern Komisi X DPR RI. Seluruh Fraksi dan Pemerintah menerima dan menyetujui RUU tentang Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi UU dan diteruskan dalam Pembicaraan Tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI.

Pada Sidang Paripurna, Menpora RI Zainudin Amali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembahasan UU Keolahragaan. Dengan disahkan UU Keolahragaan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan Olahraga.



12 BAHASAN POKOK RUU PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI

“UU ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi, daya saing SDM, dan memberikan perlindungan dan”
kepastian hukum kepada Psikolog, Klien, serta masyarakat”

(Hetifah Sjaifudian, Ketua Panja RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi)

substansi pendidikan dalam UU Pendidikan dan Layanan Psikologi tidak mengatur secara khusus (lex specialis) penyelenggaraan pendidikan psikologi. Seluruh penyelenggaraan pendidikan psikologi baik program akademik maupun profesi tunduk pada UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat dengan berbagai permasalahan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya dengan menyediakan program spesialis dan subspecialis pada penyelenggaraan pendidikan profesi. Sehingga lulusan pendidikan profesi psikologi tidak hanya Psikolog Umum, namun akan tersedia Psikolog Spesialis dan Psikolog Subspesialis.

UU ini memberikan pengaturan dan kepastian adanya kerja sama perguruan tinggi dan organisasi profesi, dimana keduanya memiliki tanggung jawab mulai dari proses pendidikan profesi sampai dengan lulusan mendapatkan pengakuan atas kompetensinya sebagai psikolog. Pengaturan ini penting, mengingat kerja sama perguruan tinggi dan organisasi profesi akan mutu layanan profesi psikolog.

UU ini memberikan kepastian pengaturan kepada psikolog untuk memiliki STR dan mendapatkan SILP, dimana STR dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi dan SILP diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan psikologi.

UU ini memberikan jaminan mutu layanan psikologi yang akan dilakukan oleh Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis melalui pemberian kewenangan sekaligus mencerminkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing profesi psikolog.

UU ini memberikan perlindungan Psikolog dan Klien, melalui pengaturan bahwa setiap layanan psikologi harus didasari adanya persetujuan antara Klien dan Psikolog baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan standar layanan psikologi.

memberikan penegasan dan penguatan terhadap penyelenggaraan pendidikan profesi hanya dapat diikuti oleh sarjana psikologi melalui program profesi yang akan menghasilkan lulusan Psikolog Umum, program spesialis yang akan menghasilkan lulusan Psikolog Spesialis, dan program subspecialis yang akan menghasilkan Psikolog Subspesialis.

UU ini juga menguatkan penyelenggaraan pendidikan akademik, dengan membuka kesempatan bagi lulusan sarjana, sarjana terapan, magister, dan magister terapan dari berbagai bidang studi. Pengaturan ini diharapkan akan memperkuat dan memperkaya keilmuan psikologi sehingga menghasilkan ilmuwan psikologi yang mendukung pengembangan keilmuan psikologi dan layanan psikologi.

UU ini menata dan memberikan kepastian proses serta tahapan penyelenggaraan pendidikan bagi para psikolog melalui pendidikan akademik dan pendidikan profesi, baik psikolog yang berpraktek memberikan layanan maupun psikolog sebagai ilmuwan. Hal ini diharapkan akan berdampak secara langsung terhadap layanan psikologi yang optimal.

psikolog lulusan luar negeri dan psikolog asing diberikan kepastian pengaturan dalam memberikan layanan setelah psikolog tersebut memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat ijin layanan psikologi (SILP).

Untuk menjaga kompetensi Psikolog, UU ini mengatur bahwa Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) harus diperpanjang oleh Psikolog yang masih akan memberikan layanan psikologi.

Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan bidang psikologi, UU ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan kepada induk organisasi profesi himpunan Psikologi sesuai dengan kewenangannya.



10 BAHASAN POKOK RUU KEOLAHRAGAAN

“capaian prestasi olahraga di tingkat internasional adalah barometer kemampuan negara dalam memajukan kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya”.

(Dede Yusuf, Ketua Panja RUU Keolahragaan)

penguatan olahraga sebagai bagian dari SDGs.

RUU ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan, dan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

RUU Keolahragaan mengatur dana perwalian keolahragaan, yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga non-pemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga. Selain itu, terdapat bantuan dana olahraga langsung kepada cabang olahraga untuk pengurus olahraga tingkat pusat. Adapun untuk pengurus daerah-daerah, bantuan dana dapat melalui KONI atau langsung ke cabang olahraga melalui hibah.

RUU ini mengatur desain besar olahraga nasional untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan bertaraf nasional dan/atau internasional.

Terdapat pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital/elektronik, namun tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial. Hal ini didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga. Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik harus diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan.

Diatur dan ditegaskan adanya 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat. Dalam hal mediasi dan konsiliasi, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi.

penguatan olahragawan sebagai profesi, dan pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaan, dilakukan bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, dan kewarganegaraan, melainkan juga perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Terdapat pengaturan yang jelas mengenai tugas, kewenangan, dan sinergitas KONI-KOI. KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada KOI untuk mengirim atlet ke ajang internasional, dan KOI harus melaksanakan rekomendasi tersebut. Dengan demikian terjadi sinergi dan kolaborasi yang baik diantara kedua lembaga tersebut.

Diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan supporter, antara lain dalam bentuk perlindungan hukum dan prioritas untuk menjadi bagian dari pemilik klub.

Dibentuk sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga Nasional, yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.

RUU ini diselaraskan dengan UU Penyandang Disabilitas. Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Aksi Protes Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Lumpuhkan Pariwisata Labuan Bajo

Yohanes Romualdus alias Kancek merupakan satu dari sekian banyak penyedia jasa pariwisata dan pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menolak kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK).

Pada 1 Agustus 2022, pemerintah provinsi meresmikan harga tiket menjadi Rp3,75 juta untuk masuk ke TNK termasuk Pulau Padar, Pulau Komodo, dan perairan sekitarnya. Sebelumnya, tiket masuk ke TNK hanya berkisar Rp150 ribu. Kenaikan harga tiket itu dinilai tidak masuk akal.

"Kami sudah punya tamu yang sudah booking untuk trip bulan ini. Tapi begitu ada kenaikan itu beberapa tamu yang batal untuk datang ke Labuan Bajo karena (tiket) kemahalan dan tidak masuk akal," katanya kepada VOA, Senin (1/8).

Menurut Kancek, kenaikan harga tiket itu telah membuat para pelaku pariwisata di Labuan Bajo turun ke jalan untuk melakukan protes. Mereka juga sepakat untuk mogok beroperasi sebulan penuh.

"Seluruh pelaku pariwisata di Labuan Bajo menyatakan mogok kerja mulai 1 sampai 31 Agustus 2022 sebagai bentuk protes atas kenaikan tiket itu," ungkapnya. Aksi mogok ini melumpuhkan pariwisata di Labuan Bajo yang selama ini digembargemborkan sebagai destinasi super prioritas Indonesia.

”

HARAPAN KAMI SEDERHANA SAJA, BATALKAN KENAIKAN KARENA ITU BUKAN MURNI DARI PEMERINTAH PUSAT.

"Tidak ada sama sekali (aktivitas), sama sekali lumpuh. Hotel juga tidak menerima tamu, di bandara tamu tidak ada yang jemput, di pelabuhan juga tidak ada tamu yang berangkat. Kami sudah semua sepakat untuk tidak melayani pariwisata," ucap Kancek.

Kancek menuding kenaikan harga tiket masuk ke TNK merupakan dampak monopoli Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT. Diketahui PT Flobamor, sebuah BUMD, merupakan pengelola jasa wisata di Pulau Komodo.

"Sangat terkesan sebagai monopoli bisnis di pariwisata dan ini didukung oleh Menteri Pariwisata, Gubernur NTT, dan Bupati Manggarai Barat. Harapan kami sederhana saja, batalkan kenaikan karena itu bukan murni dari pemerintah pusat. Itu adalah murni bisnis dari BUMD untuk memonopoli pariwisata," ujarnya.

Akademisi sekaligus pengamat pariwisata, Sari Lenggogeni, menilai kenaikan harga tiket masuk ke TNK itu akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan uji coba terkait penetapan harga tiket.

"Saya setuju dengan prinsip keberlanjutan. Tapi tentu harganya agak tidak masuk akal Rp3,75 juta karena harus dicoba dan disurvei dahulu. Untuk harga itu banderolnya menurut saya tinggi. Bukan malah mengurangi malah takutnya jadi tidak ada yang datang," katanya saat dihubungi VOA.

Sari menyarankan agar pemerintah bisa menggunakan sistem zonasi dalam penetapan harga tiket masuk ke TNK. Sistem zonasi itu akan bisa menstimulasi pasar-pasar dengan kelas yang dianggap wajar soal kenaikan harga tersebut "Makanya perlu dilakukan zonasi mana yang benar-benar pasar premium dan segmen biasa. Jangan sampai



pascapandemi orang-orang ingin berwisata malah jadi tidak ada yang datang karena dianggap terlalu mahal dan tidak terjangkau. Jangan diberlakukan dahulu dan harus ditinjau kembali," ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendy, menilai kebijakan menaikkan harga tiket masuk ke TNK kurang tepat. "Kami meminta ini ditinjau ulang dahulu. Sebaiknya menunda terlebih dahulu (kenaikan harga tiket) sebelum masa sidang DPR dan pemerintah menjelaskan tentang urgensi dari kenaikan tersebut. Jika urgensinya konservasi, apakah tidak ada cara lain?," ujarnya kepada VOA.

Kemudian, Dede berharap agar kenaikan tiket itu ditunda sampai pemerintah bisa memberikan penjelasan kepada DPR RI tentang alasan menaikkan harga tersebut. Pasalnya, kenaikan harga tiket masuk ke TNK itu telah menciptakan penolakan dari masyarakat di Labuan Bajo.

"Ini penolakan dari masyarakat berimbas pada demo dan mogok kerja, bukannya itu malah akan berdampak terhadap citra Labuan Bajo. Ini harus didudukkan dengan baik jangan sampai yang terjadi malah pemerintah bersitegang dengan masyarakat," ucapnya.

Dede pun mengimbau agar pihak keamanan tidak represif terhadap para pelaku pariwisata yang protes atas kenaikan harga tiket masuk ke TNK tersebut.

"Jangan sampai nanti konflik-konflik yang sifatnya kekerasan malah membuat citra dari Pulau Komodo di mata internasional menjadi rusak," katanya.



Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo, (foto:Cele)

Dalam waktu dekat Komisi X DPR RI mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terkait kenaikan harga tiket masuk ke TNK.

"Saya sudah baca beberapa pernyataan Menteri Pariwisata yang mengatakan bahwa ini berlaku terusan. Ini belum diputuskan secara bersama-sama lembaga Kemenparekraf. Masih ada peluang ini dihentikan atau ditunda sampai bertemu angka yang lebih rasional. Jangan membebankan tiket terusan satu tahun dengan dalih konservasi," pungkask Dede.

Sebelumnya, Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan kenaikan harga tiket masuk ke TNK sebesar Rp3,75 juta per orang untuk per tahun berlaku di pulau yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi, yakni Pulau Komodo dan Pulau Padar, sementara tarif masuk ke Pulau Rinca tetap sama.

"Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, bahwa di Pulau Rinca komodonya sama. Mukanya, badannya, dan besarnya juga sama. Namun kalau memang wisatawan ingin berkunjung ke Pulau Komodo atau Pulau Padar yang mukanya juga sama, tampangnya sama dan setting-nya juga sama maka akan diminta berkontribusi untuk konservasi," kata Sandiaga, Senin (25/7) pekan lalu. Kunjungan wisatawan ke destinasi super prioritas itu juga

dibatasi menjadi 200 ribu pengunjung per tahun. Kenaikan harga tiket dan pembatasan jumlah pengunjung itu, menurut kementerian itu, penting untuk upaya konservasi dan peningkatan ekonomi.

Sampai berita ini diturunkan Pemerintah Provinsi NTT belum memberikan keterangan terkait kenaikan harga tiket dan protes dari para pelaku pariwisata. Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, masih belum menjawab pertanyaan dari VOA. [aa/ab] (www.VOAINdonesia.com)

”

TUNDA TERLEBIH DAHULU (KENAIKAN HARGA TIKET) SEBELUM MASA SIDANG DPR DAN PEMERINTAH MENJELASKAN TENTANG URGENSI DARI KENAIKAN TERSEBUT

Kekosongan Tenaga Pengajar, Djohar Arifin Wanti-Wanti Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mewanti-wanti pemerintah jangan sampai membuat kebijakan yang tidak tepat dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Sebab, kebijakan yang ada seperti mengangkat guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan permasalahan kekosongan tenaga pengajar di lembaga pendidikan swasta, yang merupakan tempat semula guru tersebut mengajar.

“Semua guru-guru itu lolos dalam tes, hendaknya ditempatkan di tempat awal, tempat asal. Sehingga mengganggu stabilitas pendidikan di sekolah-sekolah, di seluruh penjuru tanah air,” tegas Djohar usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6/2022).

Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan maupun sarana prasarana dalam pelaksanaan pendidikannya. Djohar menilai, rendahnya gaji guru honorer yang hanya berkisar Rp300.000 tersebut tidak manusiawi. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa dalam kunjungan Komisi X DPR RI ke Deli Serdang tersebut, disampaikan bahwa berbagai program digalakkan Bupati dan pemerintah daerah guna memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif meski dengan segala keterbatasan. Ia juga

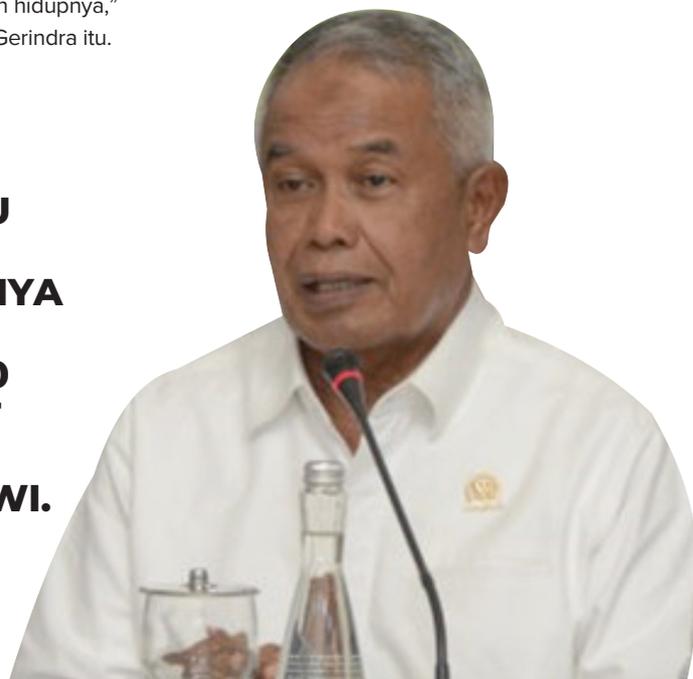
mengapresiasi sekaligus berharap program-program yang saat ini tengah dijalankan Deli Serdang untuk pendidikan di sana dapat lebih kokoh. “Oleh karena ini, kita mungkin akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, Menteri Pendidikan, untuk mencari peluang-peluang ‘apa yang bisa kita bantu untuk guru-guru yang seperti ini’.

Mereka belum lolos diterima tetapi aktivitas mereka (guru honorer) masih sangat sangat diperlukan bagi sekolah. Mungkin perlu adanya biaya-biaya penelitian, tunjangan dan apa yang bisa kita berikan sehingga mereka mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya,” terang politisi Partai Gerindra itu.

”

**GAJI GURU
HONORER
YANG HANYA
BERKISAR
RP300.000
TERSEBUT
TIDAK
MANUSIAWI.**

Djohar Arifin Husin,
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi Partai Gerindra
Dapil Sumatera Utara III



Di akhir, politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III ini pun berharap pandangan politik, regulasi, maupun kebijakan lainnya terhadap guru dapat bergerak ke yang lebih baik. “Nah itulah (saya mau lihat) orang-orang bangganya jadi guru. Karena itulah perlu adanya undang-undang yang kuat untuk mem-backup guru-guru kita, sehingga profesi ini setara sejajar dengan aparat pemerintah lainnya seperti TNI, Polri, pemerintah daerah. Sehingga guru-guru berada posisi yang benar. Jadi ini perjuangan kita bersama,” tutupnya.

Mujib Rohmat Nilai Sudah Saatnya Pemerintah Apresiasi Guru



”

MEREKA (GURU HONORER) SEBAIKNYA LANGSUNG SAJA DIANGKAT MENJADI PNS, WALAUPUN MELALUI APA NAMANYA, PPPK (MISALNYA)

Mujib Rohmat, Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi PDI-P Dapil Jawa Tengah I

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai sudah saatnya pemerintah memberikan apresiasi kepada para guru. Menurutnya, seorang guru bukanlah sekedar pencari kerja karena faktanya mereka telah bekerja sejak lama, bahkan puluhan tahun mendedikasikan diri sebagai guru, sehingga dirinya menginginkan guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami sangat setuju sekali dan akan menjadi kesimpulan dari (rapat) Komisi X dengan pemerintah, bahwa mereka (guru honorer) sebaiknya langsung saja diangkat menjadi PNS, walaupun melalui apa namanya, PPPK (misalnya),” ungkap Mujib ketika ditemui Parlemen usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6/2022).

Politisi Partai Golkar tersebut melanjutkan, guna mewujudkan hal

tersebut, Komisi X DPR RI perlu berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya yang merupakan mitra dari komisi lain, sebab ranah fungsi Komisi X DPR RI terbatas pada fungsi guru dan pendidikan. Sedangkan untuk fungsi kepegawaian maupun keuangan berada pada komisi lain, yakni Komisi II DPR RI dan Komisi XI DPR RI. “Tapi memang kebetulan ketemu kelemahan kami memang harus kolaborasi Pak. Komisi X sendiri enggak bisa, karena kebetulan yang mengurus fungsi pendidikannya, gurunya di kami, Komisi X. Tapi fungsi kepegawaiannya adalah di BKN kemudian KemenPAN-RB (mitra kerja Komisi II DPR RI), uangnya yang merancang itu juga berada di lembaga lainnya (Kemenkeu). Karena itu memang kolaborasi menjadi satu catatan penting,” imbuh Mujib.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I ini pun juga

mengapresiasi atas berbagai inovasi yang telah dilakukan Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang luar biasa. Selain itu, ia pun mengaku melihat dari apa yang disampaikan Bupati Deli Serdang, tampak terbangun satu semangat mencerdaskan, membangun karakter dan juga mengakui eksistensi negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika.

“Jujur saja kami juga merasa masih agak kurang puas bahwa perhatian pemerintah terhadap jenis sekolah antara formal dan non-formal. Kalau seandainya ini memiliki adil dan perhatian yang sama, beragam istilah program dan istilah jenis-jenis (pendidikan) yang seperti tadi itu, bila sekolah-sekolahan yang tadi dihidupkan itu akan luar biasa,” tuturnya sembari berharap pendidikan di sektor non-formal bisa mendapatkan perhatian yang sama dengan sekolah yang formal. (hal/sf)



Muhammad Kadafi, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Dapil Lampung I

Muhammad Khadafi: Angin Surga Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK Jangan Sampai Hoaks

”

ANGIN SURGA INI HARUS SAMPAI DAN MENJADI PENYEJUK AKAN HARAPAN BAGI PARA PPPK

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Khadafi meminta kabar baik atau angin surga yang disampaikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terkait pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jangan sampai kemudian menjadi hoaks.

Menurut dia, angin surga ini harus sampai dan menjadi penyejuk akan harapan bagi para PPPK berkenaan dengan status kepegawaian mereka ke depannya.

“Hari ini kita pahami mereka (guru honorer) berjuang itu cukup luar biasa untuk menjalankan amanat konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini yang harus kita berikan pemahaman kepada banyaknya kepala-kepala daerah untuk bisa melaksanakan kewajibannya, sehingga apa yang disampaikan di tataran pusat itu bisa diimplementasikan dan dijalankan pada tataran daerah,” ujar Kadafi dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Formasi GTK-PPPK 2022 Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).

Dalam rapat ini Komisi X DPR RI mengundang Dirjen GTK Kemendikbud Ristek RI, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Dirjen Anggaran

Keuangan Kementerian Keuangan RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kemendagri RI, Deputi Perencanaan dan Pengadaan KemenPAN RB RI, dan Kepala BKN RI. Rapat tersebut membahas Evaluasi hasil seleksi Guru PPPK dan kajian/skema penyelesaian formasi GTK PPPK.

Terkait permasalahan mengenai penempatan masih banyaknya guru yang belum memiliki posisi serta kebutuhan daerah terkait beberapa mata pelajaran yang sebelumnya belum terakomodir, dalam rapat tersebut, terungkap pemerintah daerah mengusulkan formasi sebanyak 131.239 (17,3 persen) dari 758.018 total kebutuhan formasi 2022.

Formasi usulan tersebut sudah termasuk guru agama sebanyak 39.008 (16,7 persen) dari 233.955 kebutuhan, guru seni budaya (mencakup muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian sebanyak 2330 (23,2 persen) dari 10.047 kebutuhan, guru PJOK sebanyak 11.111 (16,3 persen) dari 68145 kebutuhan dan guru kelas TK sebanyak 664 (28,4 persen) dari 2340 kebutuhan.

Kadafi mengatakan, dirinya mencatat ada 191 pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali.

Menurutnya, hal itu berarti dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi, sehingga hampir 37 persen pemda belum mengusulkan formasi sama sekali. Sehingga dirinya mengusulkan untuk dilakukan pengklasteran dalam implementasinya sehingga meminimalisir misinformation dan diharapkan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di daerah.

“Artinya (daerah) masih belum paham, mungkin lebih baik ke depan sistemnya diklasterkan. Misalnya Sumatera, di-kelarin dulu sehari itu. Apa yang mau ditanya itu biar jelas,” imbuh Kadafi.

Berkenaan dengan pengangkatan guru PPPK, ia mengungkapkan di lapangan ditemukan pula permasalahan yang terjadi di sekolah swasta. Kadafi menjelaskan, banyak guru-guru dari sekolah swasta yang berpindah karena lulusnya dari tahap 1 dan 2, sehingga sekolah tersebut kekurangan tenaga pengajar. Dirinya berharap, Kemendikbud Ristek dapat membuat suatu kebijakan sehingga guru dapat kembali ke sekolah asal.

Di akhir, dirinya berharap, agar “angin surga” yang sudah terang benderang tersebut bisa dirasakan secara langsung oleh guru-guru PPPK.

“Mudah mudahan angin surga yang sudah terang benderang ini, surganya sudah jelas, bisa dirasakan oleh seluruh guru-guru PPPK dan memberi semangat baru untuk teman teman guru honorer untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi agar bisa lulus diseleksi PPPK berikutnya,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung I tersebut. (Jurnas.com)

DPR RI Dan Kantor Bahasa Bengkulu Sosialisasikan Pengutamaan Bahasa Indonesia

Anggota DPR RI Dewi Coryati bersama Kantor Bahasa Bengkulu menggelar kegiatan sosialisasi Pengutamaan Bahasa Indonesia yang diikuti 120 peserta.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Prof. E. Aminudin Aziz, didampingi Kepala Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu: Dwi Laily Sukmawati, S.Pd., M. Hum, menjelaskan bahwa para peserta tersebut terdiri atas, 45 lembaga yang terdiri 15 lembaga pemerintah, 20 lembaga pendidikan, 10 lembaga swasta.

"Selain itu, kami juga mengundang 75 peserta yang merupakan mitra Kantor bahasa, antara lain Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Guru Penggerak (BGP), DPRD Provinsi Bengkulu, Para pimpinan/ Rektor perguruan tinggi, Para akademisi, tenaga pendidik baik guru TK, SD, SMP, dan SMA, Polda Bengkulu, dan Para pimpinan dan pelaku media massa, baik cetak dan elektronik," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sejauh ini Kantor Bahasa telah mengambil data melalui Tim pada bulan Juni 2022 berupa dokumentasi penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen surat resmi di 45 lembaga di Provinsi Bengkulu.

"Setelah pengambilan data, Tim KBP Bengkulu mengadakan sosialisasi pengutamaan bahasa negara yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 21 Juli 2022, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan terhadap

”

KEGIATAN INI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN SIKAP POSITIF LEMBAGA DAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA



Hj. Dewi Coryatil, M.Si., Anggota Komisi X Fraksi PAN Dapil Bengkulu

45 lembaga pada bulan Agustus mendatang. Terakhir kami akan mengadakan evaluasi pada bulan September—November," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Dewi Coryati, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini ada dua hal. Pertama, Pengutamaan Bahasa Negara di Provinsi Bengkulu sebagai upaya untuk meningkatkan sikap positif lembaga dan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga.

"Kita berharap dengan kegiatan ini bisa menjadi nilai tambah bagi

peserta," singkatnya.

Selain sosialisasi ini telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan atau MOU antara Pemerintah Provinsi

Bengkulu dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta penandatanganan komitmen bersama terkait pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Rohidin Mersyah, Kadisdikbud Provinsi Eri Yulian, Plh Sekdaprov dan Kadis Diknas Kota Bengkulu.(red)

(Realitapost.com)

Andreas Hugo Minta Adanya Keberpihakan Berimbang pada Lembaga Pendidikan Swasta

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk mulai memberikan perhatian yang berimbang pada lembaga-lembaga pendidikan swasta pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Lantaran dari berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan perwakilan perguruan tinggi, masyarakat, maupun mahasiswa, ada ketimpangan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta.

“Nah kalau saya perhatikan di anggaran (Kemendikbud Ristek) ini, (pada) rapat-rapat kami atau dengar pendapat yang selama ini kita bicarakan, kita belum sampai pada upaya untuk menerobos pada keberpihakan (kepada pendidikan swasta) tersebut. Artinya, bagaimana kita mencari jalan keluar untuk juga memberikan perhatian yang berimbang dengan pendidikan lembaga-lembaga pendidikan swasta. Saya kira, mulailah kita mulai dari tahun ini. Kita memberikan porsi yang seimbang lah. Kalau tidak dikatakan seimbang, porsi yang memberikan mereka juga harapan,” ujar Andreas pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Ristek beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Dalam diskusi maupun RDPU yang dilakukan Komisi X dengan berbagai sivitas akademika, ada ketimpangan antara pendidikan negeri dan swasta itu terjadi baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah, maupun

pendidikan tinggi. Artinya ini perlu adanya keberpihakan Pemerintah Indonesia untuk melihat kepentingan pendidikan swasta ini dalam konteks nasional. Demikian juga pada perkembangan kemajuan pendidikan di luar Jawa, di bagian barat dan timur serta daerah-daerah perbatasan yang juga mengalami kesulitan.



PEMERINTAH INDONESIA PERLU UNTUK MULAI MEMPERHATIKAN, MEMBERIKAN PERHATIAN LEBIH TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA

Andreas Hugo Pareira,
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi PDI-P
Dapil Nusa Tenggara Timur I



“Kita tidak mau mengatakan bahwa yang di negeri itu harus diistimewakan, tapi juga jangan sampai menganak tirikan yang di swasta. Nah sementara kalau kita lihat di dalam pembiayaan ini, tidak ada atau belum ada apa? Political will kita gitu, dari bangsa ini. Nah saya kira ini tentu pasti kita masih akan mengelaborasi ini didalam bentuk anggaran di pagu ini. Jadi saya kira, perlu jugalah kita mulai

memperhatikan, memberikan perhatian lebih,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

Dari RDPU yang dilakukan Komisi X dengan dosen, maupun pelaku pendidikan dan perwakilan mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan swasta juga, mereka mengaku mengalami kesulitan di dalam situasi ini. Dosen swasta di perguruan tinggi swasta pada hampir di setiap rapat dengar pendapat selalu datang dan menyampaikan keluhan-keluhannya. Jadi, Andreas berharap Pemerintah Indonesia perlu untuk mulai memperhatikan, memberikan perhatian lebih terhadap lembaga pendidikan swasta.

“Tapi terus terang ya kami mendengar dan menyampaikan bahwa

menjanjikan akan menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Pak Menteri dan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga saya pikir, ini perlu menjadi kebijakan besar lah Pak Menteri (Nadiem Makarim). Bahwa ada keberpihakan dan itu muncul di dalam perencanaan-perencanaan anggaran yang nanti yang akan kita buat ini,” tutup legislator dapil Nusa Tenggara Timur I tersebut.

Pemerintah Harus Siapkan Sarpras Untuk Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf meminta pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP). Menurut Dede, pemerintah tidak boleh hanya berbicara program atau project based, tapi harus menyiapkan platform menuju era digital. Pasalnya, Komisi X DPR RI masih menemukan ketidaksiapan fasilitas seperti infrastruktur internet, listrik dan pelatihan SDM.

"Itu sebabnya pelatihan pendidikan kepada para guru agar kompetensinya meningkat sebagai tujuan menuju kepada era digitalisasi benar-benar bisa berjalan, tidak hanya untuk sekolah penggerak saja tapi bisa juga dilakukan untuk semua sekolah," ujar Dede saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (13/6/2022).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sebaiknya pemerintah mengutamakan delapan standar pendidikan, salah satunya ketersediaan ruang kelas. "Kalau ruang kelasnya sudah mau roboh gimana? Ini kan juga menjadi standar pendidikan yang harus kita sepakati bersama. Jadi oleh karena itu, kita harus duduk bersama semua kementerian yang terlibat. Jangan hanya menjalankan program yang berdasarkan ide dasarnya dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) saja," pungkas Dede.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini menyatakan, jika

”

**PELATIHAN
PENDIDIKAN
KEPADA PARA
GURU AGAR
KOMPETENSINYA
MENINGKAT**



Dr. Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Jawa Barat II

Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk memperbaiki SDM, berarti seluruh kementerian terkait harus duduk sama-sama menjelaskan rencana dan program yang akan dijalankan. Misalnya di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), apa saja sarpras yang dibutuhkan, baru bisa berbicara tentang peningkatan SDM. Karena tanpa fasilitas pendukung seperti listrik dan internet, pelajar yang berada di pesisir dan kepulauan tidak

memiliki kesempatan yang sama.

"Nah, kunci utama peningkatkan SDM adalah semua memiliki kesempatan yang sama. Untuk itu, semua pihak harus duduk bareng, sebetulnya peta jalan pendidikan kita ke depan ini mau kemana? Kalau kita mau bicara anak-anak pandai dalam dunia digital industri 4.0, maka untuk menuju ke sana butuh apa saja. Jadi menurut saya, intinya di republik ini memang koordinasi adalah barang yang mahal sekali," seloroh Dede.

Fraksi NasDem DPR Setujui Usulan Anggaran Kemendikbudristek 2023 Dengan Catatan

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyatakan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPR RI mendukung seluruh rencana kerja dan menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) tahun anggaran 2023. Namun dengan catatan, seluruh yang sudah direncanakan dapat bersentuhan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Khususnya program-program seperti bantuan beasiswa dan sebagainya, karena ini sangat meringankan beban orang tua siswa, juga apalagi kita sekarang sedang masuk pasca pemulihan (pandemi Covid-19),” ucap Ratih saat mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Lebih lanjut, legislator dapil Sulawesi Barat itu juga mengingatkan saat ini dunia pendidikan Indonesia sedang menghadapi banyak pekerjaan rumah yang harus segera diberi perhatian dan diselesaikan, termasuk diantaranya tidak adanya formasi setelah lulus passing grade seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan nasib guru honorer setelah dikeluarkannya peraturan penghapusan tenaga honorer tahun 2023.

“Posisi tenaga kependidikan saat ini juga masih banyak yang terombang-

aming, mereka berprofesi mulai dari tenaga tata usaha hingga penjaga sekolah yang berstatus honorer ini, sedang mengalami rasa ketidak pastina, rasa kewaswasan, kecemasan karena ada aturan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini. Jadi kami ingin nantinya mereka ini tidak luput dari perhatian dan bisa memperjuangkan nasib mereka,” pinta Ratih.

Di kesempatan yang sama, Ratih juga menyampaikan kondisi dapilnya yang baru saja mengalami bencana alam berupa gempa berkekuatan 5,8 skala richter, yang kini butuh juga perhatian dari Kemendikbudristek RI karena banyak fasilitas pendidikan

seperti bangunan sekolah yang rusak karena gempa. “Sampai akhirnya orang-orang harus mengungsi, terkhususnya juga untuk sekolah-sekolah, banyak juga kampus, sekolah SD sampai dengan SMP dan SMA yang juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Jadi, semoga ini juga perhatian dari Kemendikbudristek RI dan mendapatkan perbaikan sarpras (sarana dan prasarana). Apalagi di masa pemulihan pandemi Covid-19 dan lain sebagainya kami mengalami bencana seperti ini. Tentu bantuan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat itulah yang sangat sedang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Barat, terkhususnya yang ada di Mamuju,” tutupnya.



POSISI TENAGA KEPENDIDIKAN SAAT INI JUGA MASIH BANYAK YANG TEROMBANG-AMBIING,



Ratih Megasari Singkarru, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Nasdem Dapil Sulawesi Barat

Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Pemangku Kepentingan di Kota Salatiga

Ketua Tim Kunjungan Reses Komisi X DPR RI Djohar Arifin meminta masyarakat terutama kalangan guru dan pegawai perpustakaan yang ingin segera diangkat menjadi guru PPPK, agar tetap mengikuti prosedur yang ada. Jika berada di luar jalur prosedur, pihaknya tidak dapat membantu. "Kemanapun kita pergi masalahnya hampir sama tentang pendidikan, masalah guru PPPK dan sebagainya, termasuk usulan bagaimana supaya tenaga teknis perpustakaan juga masuk dalam program guru honorer," ungkapnya.

"Ini tentu kita akan sampaikan apa adanya, dan kita harapkan mereka ikuti prosedur yang ada untuk bisa diangkat jadi guru PPPK, untuk diangkat jadi guru honorer yang digaji Pemerintah. Jadi saya katakan jangan ada yang tidak ikuti prosedur, karena tidak mungkin kita membantu jika mereka tidak berada di jalur," kata Djohar menambahkan, usai memimpin pertemuan dengan Pj Walikota Salatiga, Sinoeng Noegroho Rachmadi, dan jajaran mitra kerja Komisi X DPR RI di Gedung Sekda Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).

Permasalahan lainnya yang disuarakan oleh para stakeholder di Salatiga yaitu soal penerimaan murid baru PPDB. Hampir seluruh daerah yang dikunjungi Komisi X DPR merasa keberatan dan ketidakadilan dengan adanya sistem zonasi tersebut. Ia menegaskan terkait

dengan persoalan tersebut, DPR akan mendorong kebijakan itu ditinjau ulang dan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi seluruh pihak.

"Jadi bukan satu dua masalah, masing-masing punya masalah, di tiap daerah masalahnya beda. Ini yang harus kita inventarisir semua dan akan kita bahas bersama sehingga nanti kita akan dapat suatu keputusan yang lebih baik dari sekarang. Jadi banyak sekali yang dirugikan dengan kondisi seperti ini," katanya.

Aspirasi selanjutnya terkait pegawai teknis perpustakaan yang sangat berharap dapat memiliki kesempatan yang sama dengan guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK ataupun PNS. Ke depan Djohar menyatakan akan meminta pegawai honorer perpustakaan dapat memiliki kesempatan yang sama.

Sementara terkait dengan aspirasi para perguruan tinggi yang hanya berkuat dengan akreditasi, Djohar meminta agar tidak berkuat pada hal tersebut.

Melainkan inovasi bagaimana meningkatkan skill mahasiswa sehingga memiliki nilai jual bagi prestasi yang dimiliki perguruan tinggi dan mahasiswa di dalamnya. "Jadi perguruan tinggi jangan berkuat hanya kepada akreditasi-

akreditasi. Inovasi-inovasilah bagaimana mereka bisamenjual ilmu-ilmu mereka dapat bagaimana mereka bisa menjual produk-produk mereka, bukan hanya lokal nasional juga internasional.

**”
JADI BUKAN
SATU DUA
MASALAH
MASING-
MASING PUNYA
MASALAH, DI
TIAP DAERAH
MASALAHNYA
BEDA.**



Jadi ada peluang tinggi mereka dapatkan mereka hasil produk mereka dibeli dari negara Eropa dari Amerika, dia menyiapkan tenaga-tenaga mahasiswanya nanti begitu selesai tamat pasti mudah mencari rezeki karena punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Jadi saya harapkan inovasi-inovasi perlu digalakkan oleh setiap perguruan tinggi agar mereka bisa survive jangan hanya terpaku kepada akreditasi-akreditasi," tegasnya.

Terakhir, Djohar menilai sebenarnya Salatiga memiliki potensi yang sangat bagus ke depannya. Mengingat, iklim cuaca yang sejuk dan nyaman cocok dijadikan sebagai tempat pusat latihan sepakbola nasional, seperti zaman dahulu saat dirinya masih menjadi atlet sepakbola. Sehingga, ia mendorong Pemerintah Kota dan masyarakat Kota Salatiga dapat mengembalikan kemanfaatan Kota Salatiga sebagai pusat latihan atlet olahraga nasional.

Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid menyerukan agar Pemerintah Kota Salatiga berikut stakeholder mitra kerja Komisi X DPR di Salatiga agar dapat menerapkan dan mengedepankan inovasi, kolaborasi dan digitalisasi. Mengingat, dengan jumlah penduduk Salatiga yang tidak terlalu banyak saat ini, bisa dijadikan potensi dalam mengembangkan sumber daya manusia di sektor lembaga formal maupun pendidikan kemasyarakatan dan juga pendidikan kreativitas.

Menurutnya, di pendidikan bagaimana mengembangkan unit-unit kreatif yang akan membangkitkan ekonomi. Dalam konteks ini ada tiga prinsip yang dinilai bagus dikembangkan. Pertama, inovasi semua unit ,semua kegiatan pendidikan kreativitas serta harus ada inovasi. "Kenapa? Karena itu yang akan dicari oleh masyarakat," ujarnya.

Kedua, membudayakan kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tapi kolaborasi

”

TIGA PRINSIP INI HARUS DIPAKAI OLEH SEBUAH LEMBAGA TERMASUK OLEH PEMERINTAH DAERAH. INOVASI, KOLABORASI, DAN DIGITALISASI

dengan berbagai kalangan. Dan ketiga, harus ada digitalisasi, karena sekarang zamannya digital. Digitalisasi sistem termasuk digitalisasi marketing.

"Jadi tiga prinsip ini yang saya kira harus dipakai oleh sebuah lembaga termasuk oleh pemerintah daerah. Inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi," katanya menegaskan.

Sodik mengatakan aspirasi-aspirasi yang disampaikan para mitra kerja akan dijadikan amunisi untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah, mengingat DPR RI adalah legislator bukan eksekutor. Masukan-masukan seperti ini dinilai sangat penting bagi DPR. Ia pun menegaskan sekali lagi bahwa pada zaman milenial saat ini tiga prinsip kerja di atas menjadi sangat penting untuk segera dikembangkan.



Djohar Arifin,
Ketua Tim Kunjungan Reses
Komisi X DPR RI

Sodik Mujahid Apresiasi Pelaksanaan PPDB di Salatiga

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid mengapresiasi proses seleksi siswa baru atau penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah kepala sekolah di Salatiga, bahwa PPDB dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu melalui jatah zonasi dan afiliasi.

"PPDB dijalin sesuai dengan prosedurnya tentang jatah zonasi tentang afiliasi tentang bantuan-bantuan yang lain itu dijalankan dengan yang baik di sekolah ini," kata

Sodik usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau SDN 06, SMPN 02, SMAN 03 di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).

Sodik juga mengapresiasi proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan pola ekstrakurikuler dan menggunakan metode atau pola partisipatif.

"Pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sini dilakukan dengan pola ekstrakurikuler. Tadi didemonstrasikan, bagaimana para siswa menampilkan pendidikan dengan pola ekstrakurikuler, dengan cara yang bagus. Jadi polanya adalah partisipatif, tidak dipimpin oleh guru bahkan dipimpin oleh seorang siswa," ujarnya

Selanjutnya, Sodik juga mengapresiasi kelengkapan perpustakaan Salatiga, dimana buku-buku yang dikirim dari pusat sudah masuk. Dan menurutnya, hal yang



Sodik Mujahid, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat I

menjadi catatan adalah terkait dengan penyempurnaan konten dari buku-buku tersebut. Politisi Partai Gerindra itu juga sempat menanyakan, soal digitalisasi perpustakaan, dimana seluruh sekolah yang didatangi sudah mengimplementasikan perpustakaan digital atau e-Library.

"Itu situasi umum yang kami dapatkan di sekolah. Tapi ada yang menarik, yaitu ketika saya tanya kenapa senang (sekolah) tatap muka atau bertemu, jawaban mereka karena senang bertemu dengan teman. Ini adalah catatan bagaimana agar guru juga bisa tampil menarik ya, dan disukai oleh anak-anak tersebut," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I itu sembari mengapresiasi penerapan prokes di SMPN 02 yang mencapai 95 persen, dan 80 persen bagi SDN 06 dan SMAN 03 Kota Salatiga. (ndy/sf)

”
**PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN
PANCASILA
DANKEWARGA-
NEGARAAN
DI SINI
DILAKUKAN
DENGAN POLA
EKSTRAKURI
KULER.**



Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Terkendala Akses Internet

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang, Sumatera Selatan masih terkendala dengan sarana penunjang, terutama Information Technology (IT). Dikarenakan Kurikulum Merdeka Belajar itu punya konsentrasi pengembangan pembelajaran yang memang fleksibel, tetapi kemudian ketergantungannya terhadap IT akses internet itu menjadi lebih kuat.

"Nah (akses internet) ini menjadi masalah bagi penyelenggara atau guru sekolah-sekolah di Palembang. Saya bisa membayangkan bagaimana dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) yang belum bisa akses internet. Dari segi konsep memang kurikulum ini menempatkan sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada guru bahkan tidak hanya terbatas pada buku, tapi yang ingin dipelajari itu adalah kehidupan itu sendiri yang luas," kata Zainuddin saat mengikuti Kunspek Komisi X DPR menyerap aspirasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang, Sumsel, Senin (15/6/2022).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, misalnya dalam kurikulum tersebut jika belajar tentang ekonomi dengan pendekatan utility memanfaatkan pasar, jadi para siswa-siswi langsung terjun ke pasar atau kalau tidak bisa disimulasikan saja. Nah, kalau mensimulasikan itu kan butuh teknologi, disinilah kelemahan dari implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar ini yang dijalankan oleh sekolah penggerak.

"Kalau sekolah penggerak kita tahu telah dijalankan di sekolah-sekolah yang bagus, kalau evaluasinya

”

YANG HARUS KITA ANTISIPASI ADALAH DAERAH-DAERAH YANG MASIH BELUM BISA MENCUKUPI GURU YANG KOMPETEN DAN SARPRAS

Zainuddin Maliki,
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN
Dapil Jawa Timur X



yang disampaikan oleh Kemendikbud dengan menjalankan program Kurikulum Merdeka Belajar terjadi peningkatan prestasi belajar. Capaian literasi angkanya menjadi 570, sedangkan saat menerapkan kurikulum 2013 hanya mencapai angka 532, setelah terkena pandemi turun lagi menjadi 482. Dengan menerapkan kurikulum ini memang ada peningkatan capaian literasi, akan tetapi hanya di sekolah-sekolah yang SDMnya sudah baik," terang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X ini.

Zainuddin menerangkan, untuk para guru yang menjalankan kurikulum merdeka belajar ini di Palembang sudah mendapatkan bimbingan, pendampingan atau pelatihan tetapi yang mereka keluhkan adalah sarana penunjangnya terutama adalah IT. "Yang harus kita antisipasi adalah daerah-daerah yang masih belum bisa mencukupi guru yang kompeten dan sarpras dukungan sumber belajar itu yang perlu kita pelajari," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI untuk tidak memaksakan implementasi kurikulum Merdeka pada tahun Ajaran 2024/2025. Menurutnya, apabila kurikulum tersebut dipaksakan, hal itu akan berdampak pada pendidikan Indonesia yang akan amburadul, karena ketidaksiapan sekolah dari berbagai sisi.

“Kami memohon dengan hormat, juga teman-teman Komisi X, jangan paksakan (pelaksanaan) Kurikulum Merdeka,” tegas Ferdiansyah dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI bersama jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Politisi Partai Golkar itu menilai, jika melihat dalam proses dan kesiapan untuk mengimplementasikan Kurikulum

Ferdiansyah Desak Kemendikbud Ristek Tak Paksakan Implementasi Kurikulum Merdeka



Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat XI Foto: Devi/nvl

Merdeka, termasuk pengalaman sebelumnya, hal tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. “(Bisa) kita cek, silakan Anggota Komisi X DPR pulang ke dapil masing-masing, minimal mengunjungi 40 sekolah.

Cek satu persatu gurunya sarana dan prasarana dan sebagainya,” tandas legislator dapil Jawa Barat XI tersebut.

Ferdi meminta kebijakan kurikulum tersebut agar dikaji ulang. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai di masa mendatang kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan baru. Sebelumnya, Ferdi menjelaskan Komisi X telah melakukan kunjungan ke 89 lembaga/sekolah di 22 provinsi dan 42 kabupaten kota. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan, pelatihan guru terhadap Kurikulum Merdeka tidak akan mungkin dilakukan. (hal/sf)

Komisi X Nilai Implementasi Kurikulum Merdeka Masih Perlu Kajian Akademis

Komisi X DPR RI menilai implementasi Kurikulum Merdeka masih memerlukan kajian akademis dan evaluasi komprehensif. Kajian tersebut melingkupi pertimbangan kondisi sosiologis dan kemampuan pendidik serta tenaga kependidikan. Komisi X DPR RI melalui Panja Pendidikan Vokasi, Panja Pembelajaran Jarak Jauh, Panja Peta Jalan Pendidikan dan Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka pun telah memberikan rekomendasi.

“Hasil rekomendasi Panja yang telah dilaksanakan Komisi X DPR RI sebelumnya, sebagian besar memberikan penegasan terkait lemahnya landasan hukum kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek, baik dari sisi tidak adanya kajian akademik atau naskah akademik, terhadap tindakan guru dari orang tua

kemudian dasar filosofis yuridis maupun sosiologis dan ketidaksesuaian dengan peraturan pendidikan yang lainnya,” jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI bersama jajaran Kemendikbud Ristek RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Fikri menuturkan, perubahan satu kebijakan dalam hal ini kurikulum baru membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kurikulum sebelumnya. perubahan kurikulum tersebut tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran di kelas saja, namun juga aspek lainnya. “Perubahan kurikulum tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran di kelas saja.

Namun juga bagaimana mempersiapkan guru, menyediakan panduan buku-buku referensi, sosialisasi



Abdul Fikri Faqih Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah I X Foto: Devi/nvl

wali murid, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung.” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Dalam kesimpulan rapat tersebut disampaikan Implementasi K-13 dan Kurikulum Merdeka tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang telah disesuaikan melalui beberapa peraturan Menteri, yaitu: Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan; Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi; Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses; Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian; dan Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum. (hal/sf)



Komisi X Apresiasi Aspirasi terkait Guru PPPK dari GLPG3K

Komisi X DPR RI mengapresiasi aspirasi yang disampaikan perwakilan Guru Lulusan Passing Grade PPPK (GLPG3K). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, Komisi X mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI untuk menertibkan linieritas pendidikan dalam seleksi guru sesuai dengan kompetensi, dan memberikan kejelasan dapodik bagi guru yang lulus passing grade.

Komisi X juga mendorong Kemendikbud Ristek RI melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk mengundang pemerintah daerah yang masih ada persoalan terkait seleksi ASN/PPPK. “Komisi X mendesak panselnas melalui Kemendikbud Ristek RI untuk terus mensosialisasikan kebijakan anggaran seleksi PPPK,” lanjut Fikri dalam RDPU dengan GLPG3K, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/7/2022). Audiensi fokus pada problematika yang terjadi terkait guru PPPK yang hingga hari ini masih terjadi.

Politisi PKS ini mengaku telah menghubungi instansi terkait dan berharap akan ada penyelesaian dari masing-masing instansi. Ia juga berharap permasalahan tersebut dapat segera menemui titik terang. “Semuanya adalah kontribusi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk generasi akan datang,” ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengungkapkan Komisi X DPR RI akan berusaha untuk membicarakan masalah ini dengan dengan kementerian terkait guna mengakomodasi permasalahan yang disampaikan GLPG3K. “Kalau perlu kita juga mengundang sejumlah kepala daerah kembali walaupun pernah kita



KOMISI X MENDESAK PANSELNAS MELALUI KEMENDIKBUD RISTEK RI UNTUK TERUS MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN ANGGARAN SELEKSI PPPK

Abdul Fikri Faqih Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah I X
Foto: Devi/nvl



mengundang kita akan undang sekali lagi,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Diketahui, beberapa aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut yakni:

1. Guru tidak mendapatkan jam mengajar lagi dan tidak memegang kelas kelas pada tahun ajaran baru 2022-2023 setelah penempatan guru PPPK yang sudah dilantik di tahap 1 dan 2;
2. GLPG3K memohon Komisi X DPR RI mengundang pemerintah daerah terkait pengajuan formasi PPPK dan ketersediaan anggaran;
3. Tenaga kependidikan sangat penting keberadaannya. Mohon agar diperhatikan dan ada seleksi bagi yang sudah mengabdikan bertahun-tahun;
4. Berharap yang sudah mengikuti

- seleksi PPPK dan lulus passing grade segera diberi SK (terutama prioritas 1);
5. Memohon agar guru swasta yang sudah lulus tidak dikembalikan lagi ke sekolah asal;
6. Formasi untuk guru Bahasa Inggris seleksi tahap 1 dan 2 tidak lebih dari 10 persen dari formasi yang tersedia;
7. Provinsi Jabar memiliki 10397 lulus passing grade, 6425 yang akan mendapat formasi, 3972 belum mendapatkan formasi pada mapel PKWU, Bahasa Inggris, PAI, PPKn, PJOK, dan SLB;
8. Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten, baru 2 kabupaten yang

- diberi JK guru yang lulus tahap 1 dan 2 di tahun 2021;
9. Lulusan PGSD tidak bisa memilih formasi berdasarkan mata kuliah, tetapi mendapatkan formasi secara otomatis sebagai guru kelas sebanyak 383 guru di sekolah swasta. Adapun jumlah seluruh guru swasta 482 karung di Kota Palembang.
10. Nasib guru yang sudah terlanjur di-PHK, pada saat ini belum mendapat SK Pengangkatan
11. GLPG3K menyerahkan tabulasi berbagai persoalan tes seleksi guru ASN PPPK tahun 2021;
12. GLPG3K meminta agar 2593 guru lulusan passing grade di Kabupaten Bekasi mendapat SK pengangkatan ASN PPPK pada tahun 2022. Begitupun dengan daerah lain. (hal/sf)

Mujib Rohmat: Komisi X Terkesan Minat Baca Masyarakat Kendal Tinggi

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat mengaku kagum dengan minat baca masyarakat Kendal yang masih tinggi, di tengah serbuan era media sosial saat ini. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau Gedung Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kendal yang dibangun diatas lahan seluas 4.606 meter persegi dengan biaya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2021 menjadi perpustakaan yang dibangun secara modern di Karangsari, Kendal, Jawa Tengah, Jum'at (15/7/2022).

"Saya sangat terkesan dengan minat baca masyarakat Kabupaten Kendal yang cukup tinggi. Kini tinggal bagaimana kita memberikan semangat dan fasilitas misalnya dengan menyediakan bukan hanya tempat tapi juga bahan bacaan, tidak hanya berupa fisik tapi berupa digital. Jadi Perpustakaan Nasional juga mitra kami, oleh karena itu kita akan terus melakukan peninjauan Perpustakaan-Perpustakaan yang ada di daerah untuk memastikan daya minat baca masyarakat bisa terus meningkat dan bisa menunjang pendidikan di daerah itu sendiri," papar politisi senior Golkar ini.

Mujib menjelaskan, selain meninjau Perpustakaan, kunjungan pihaknya itu juga untuk melihat perkembangan pendidikan di Kendal dan untuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan di Kendal yang belum terselesaikan. "Dengan demikian, setelah ini kami berharap semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan bisa terpecahkan seperti persoalan kebudayaan dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya," ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah I ini mengatakan bahwa selain bermitra dengan Kemendikbud, Komisi X DPR RI juga bermitra dengan Kemenpora, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Jadi keempat lembaga itu tidak bisa terpisahkan dengan kinerja Komisi X DPR RI. "Kami sangat



Komisi X DPR RI, usai meninjau Gedung Perpusda Kendal di Karangsari, Kendal, Jawa Tengah, Jum'at (15/7/2022).

mengapresiasi kepada Pemkab Kendal dalam pengembangan literasi. Jadi kerjasama pemerintah pusat dan daerah ini sangat terasa sekali disini," tambahnya.

Di lain pihak, salah seorang penggiat Perpustakaan Indonesia dan penggiat literasi di Kendal, Munawar mengatakan, saat ini, minat baca masyarakat harus terus di kembangkan dan harus bisa diaplikasikan di desa-desa. Perpustakaan ini harus terus dikembangkan dan diperjuangkan, karena saat ini sudah di era digital maka kita harus bisa bagaimana minat baca masyarakat bisa terus meningkat, karena buku itu sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan," pungkas Munawar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kendal, Muhammad Yusuf Ariyanto mengatakan bahwa, setelah selesainya pembangunan gedung baru Perpustakaan Kendal pada tahun 2021 lalu, kini tinggal melengkapi

” MINAT BACA MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL CUKUP TINGGI

fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti melengkapi bahan bacaan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

"Di tahun 2022 ini, kita akan mulai pengadaan pengisian perpustakaan. Semoga di awal tahun 2023 nanti Perpustakaan ini sudah bisa mulai dioperasikan. Karena dalam rencana kerja kita di tahun 2023 kita sudah mengajukan pengusulan dan sudah masuk dalam RKPd senilai Rp7,7 miliar dan itu untuk kelengkapan Perpustakaan yang nantinya di Perpustakaan Kendal akan ada fasilitas tempat pusat UMKM, teater, taman dan lain sebagainya," tutupnya. (oji/aha)

Komisi X Apresiasi Gedung Baru Perpustakaan Daerah Kendal

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meninjau gedung baru Perpustakaan Umum Daerah (Perpusda) Kabupaten Kendal yang belum lama di resmikan pembangunannya oleh Bupati Kendal di Karang Sari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).

"Saya mengapresiasi keberadaan gedung baru perpustakaan Kendal, dengan dikembangkannya fasilitas dan tempat di Perpustakaan Kendal ini, saya berharap literasi masyarakat dalam membaca buku terus meningkat. Dengan demikian, tentu dengan berkembangnya Perpustakaan itu akan bisa menunjang pendidikan yang ada di Kendal," ungkap Hetifah.

Usai mengunjungi dan melihat langsung kondisi gedung baru Perpustakaan Kendal, Hetifah yang juga politisi Partai Golkar ini menginginkan agar gedung baru tersebut tidak hanya bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk membaca buku, namun Perpustakaan juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan potensi- potensi masyarakat lainnya.

"Saya berharap, selain berfungsi sebagai perpustakaan, gedung baru ini juga bisa mentransfer atau dijadikan tempat untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan atau berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menunjang pendidikan di Kendal," ungkapnya.

Menurut Legislator Dapil Kalimantan Timur tersebut, saat ini minat baca masyarakat Kendal tinggi dan terus meningkat. Jadi untuk lebih mengembangkan Perpustakaan tersebut,

Desember, sehingga awal tahun 2023 bisa mulai dioperasikan. "Sekarang dalam proses pengadaan interior ataupun eksterior gedung perpustakaan," pungkasnya.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Kendal dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dan diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Mujib



Komisi X DPR RI, meninjau Gedung Perpusda Kendal di Karang Sari, Kendal, Jawa Tengah, Jum'at (15/7/2022).

Pemda Kendal harus bisa memberikan semangat dan fasilitas yang lebih baik lagi ke masyarakat, misalnya tidak hanya menyediakan bahan- bahan bacaan fisik saja, namun juga harus menyediakan bacaan- bacaan secara digital. "Selain itu, juga harus bisa menciptakan inisiatif yang bisa dikaitkan dengan literasi itu sendiri seperti, pariwisata olahraga dan lain sebagainya," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kendal, Muhammad Yusuf Ariyanto mengatakan pembangunan gedung Perpustakaan Kendal senilai Rp10 miliar dari DAK Bidang Pendidikan tahun 2021 itu, pada tahun 2022 ini akan mulai pengisian pengadaan di interior maupun eksterior. "Interior berupa pendingin ruangan, meubel, komputer untuk perpustakaan digital. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3 miliar yang ditargetkan selesai akhir

**”
SELAIN
BERFUNGSI
SEBAGAI
PERPUSTAKAAN,
GEDUNG BARU INI
JUGA BISA
MENTRANSFER
ATAU DIJADIKAN
TEMPAT UNTUK
MEMFASILITASI
MASYARAKAT**

Rohmat, Himmatul Aliyah, Martina, Hj. Tina Nur Alam, Lestari Moerdijat, Bisri Romly, Andi Muawiyah Romly, An'im Falachuddin Mahrus, Bramantyo Suwondo, Mustafa Kamal, Desy Ratnasari, Zainuddin Maliki dan Rojih. (oji/aha)

Komisi X Serahkan Bantuan DAK Rp332 Miliar untuk Pendidikan di Kendal



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat foto bersama usai pertemuan dengan Plh. Bupati Kendal Windu Suko Basuki di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Jumat(15/7/2022). Foto: Oji/nvi

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI menyerahkan secara simbolis bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan berupa fisik dan nonfisik senilai Rp332 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2022 sebagai bentuk apresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Kendal dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.

"Ini kami berikan bantuan DAK fisik dan nonfisik kepada pemerintah kabupaten Kendal sebagai apresiasi kami terhadap kerja keras pemkab Kendal dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Nilainya Rp 332 miliar dan semoga bisa digunakan dalam pendidikan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian kepada Plh. Bupati Kendal Windu Suko Basuki di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Jumat(15/7/2022).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa nilai bantuan yang diterima Pemkab Kendal tergolong besar bila dibandingkan dengan daerah

lain yang hanya mendapatkan bantuan sekitar Rp15 miliar. "Nilai sebesar itu memang cukup fantastis karena di daerah lain hanya mendapat bantuan sekitar Rp15 miliar. Anggota-anggota Komisi X pada iri karena untuk daerahnya, hanya dapat sedikit," jelasnya.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat, menjelaskan DAK tersebut nantinya dikelola pemerintah daerah untuk disalurkan di bidang pendidikan agar kualitas pendidikan di Kendal meningkat. "Jadi DAK tersebut nantinya yang mengelola Pemkab Kendal untuk disalurkan di bidang pendidikan supaya kualitas pendidikan di Kendal meningkat termasuk sarana dan prasarannya," kata Mujib.

Legislator Dapil Jawa Tengah I ini mengungkapkan DAK itu bisa digunakan untuk fisik seperti pembangunan sekolah baru maupun ruang kelas baru. Dirinya juga akan selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan DAK tersebut.

Di sisi lain, Plh Bupati Kendal, Windu

Suko Basuki mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Kendal. Ia berharap kunjungan Komisi X DPR RI bisa memberikan angin segar bagi dunia pendidikan dan bidang lain, khususnya di Kabupaten Kendal. "Semoga ini bisa membawa masukan dan harapan kepada insan pendidikan maupun tenaga pendidik dan juga bidang lain yang ada di Kabupaten Kendal, supaya aspirasi mereka bisa diakomodir," pungkas Windu.

Sebagai informasi, anggota komisi X DPR RI melakukan kunjungan ke kabupaten Kendal untuk menyerap aspirasi masyarakat Kendal khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Turut hadir pula staf dari Kementerian Parekrif. Selain memberikan bantuan DAK, anggota Komisi X DPR RI juga menyempatkan meninjau Gedung Olah Raga (GOR) Sasana Krida di kompleks Alun-alun Kendal. Beberapa Anggota Komisi X DPR RI bahkan sempat berbar berbar bermain bulutangkis bersama anak-anak di sela kunjungan tersebut. (oji/aha)

Komisi X Ingatkan Dinas Pendidikan Demak Tak Paksakan Kurikulum Merdeka

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengingatkan Dinas Pendidikan dan beberapa kepala sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk tidak memaksakan sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka. Sebab ia menilai kurikulum tersebut masih memiliki beberapa kekurangan.

"Kami ingatkan untuk dinas pendidikan dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten (Demak) ini untuk tidak paksakan sekolah dan para siswa mengikuti atau menjalankan Kurikulum Merdeka. Ini merupakan keputusan Panja Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI," ungkap Ferdi saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2022).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Kurikulum Merdeka yang menjadi salah satu program pemerintah ini masih memiliki banyak kekurangan, alias belum siap. Kesiapan itu terlihat dari belum adanya dasar hukum yang jelas di awal program tersebut.

Belum lagi konsep kurikulum yang belum jelas.

Dimana pemerintah pun belum mampu menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan untuk mendukung Kurikulum Merdeka tersebut.

Bahkan, menurut Ferdi, pemerintah juga belum mampu memenuhi standar guru yang ditentukan oleh Kurikulum

Merdeka tersebut. "Kalau kita lihat variabel-variabel pendukung kurikulum yang pernah ada seperti KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Kurtilas (Kurikulum 2013), semua memiliki dasar hukum yang jelas, Kedua, terkait kajian akademis kenapa kurikulum sebelumnya harus berubah jadi kurikulum ini," tegasnya.

"Kami mempersilahkan jika ingin perubahan kurikulum, tapi dasarnya, kajian akademisnya harus jelas dan kuat. (Lalu) bagaimana dengan tenaga pendidiknya, pustakawannya sudah ada atau belum. Ini merupakan hal yang sangat Penting dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. Belum lagi bicara sini pelatihannya. Kurtilas kemarin saja masih banyak yang tertinggal sehingga guru banyak yang tidak memiliki buku teks," kata Ferdi.

Dari hal tersebut, ungkap Ferdi, Panja Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi memutuskan bahwa Kurikulum Merdeka ini bukan sebuah keharusan. "Tapi saya ingatkan dikepada kepala dinas pendidikan di Demak serta bapak ibu kepala sekolah, jangan jadikan siswa dan guru korban di kemudian hari. Siswa tidak untuk coba-coba dan guru juga jangan dijadikan ladang kesalahan," pungkas legislator dapil Jawa Barat XI ini. (ayu/aha/sf)

”

**KURIKULUM
MERDEKA
MASIH MEMILIKI
BANYAK
KEKURANGAN,
ALIAS BELUM
SIAP**



Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X PR RI Ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2022). Foto: Ayu/Man

Komisi X Tampung Aspirasi Penambahan dan Perbaiki Fasilitas Sekolah di Demak

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Demak, Jawa Tengah menerima sejumlah masukan terkait permintaan fasilitas olahraga dan renovasi ruang kelas dari sekolah-sekolah di Kabupaten Demak. Sebab fasilitas yang cukup akan menunjang siswa dalam mendorong proses belajar mengajar serta meningkatkan prestasi.

“Kami tadi mengunjungi beberapa

dari SMAN 3 Demak, yakni memiliki satu kelas khusus olahraga. Dimana di kelas tersebut banyak atlet didalamnya. Sehingga perlu perhatian khusus.

Pasalnya, seorang atlet jika tidak dilakukajn pembinaan sejak awal atau sejak dini, maka prestasinya pasti akan terus menurun. Hal ini tentu yang harus dicegah. Sementara guru olahraga di sekolah tersebut telah mengantongi sertifikat pelatih level 2. Hal tersebut

”
FASILITAS YANG CUKUP AKAN MENUNJANG PROSES BELAJAR MENGAJAR SERTA MENINGKATKAN PRESTASI



Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah saat mengunjungi sekolah-sekolah dan wisata di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022). Foto: Ayu/Man

sekolah di Kabupaten Demak. Disana selain melihat langsung kondisi sekolah dan proses belajar mengajar, kami juga menerima masukan, aspirasi berupa permintaan fasilitas olahraga di beberapa sekolah dan renovasi ruang kelas di salah satu sekolah,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah saat mengunjungi sekolah-sekolah dan wisata di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).

Dijelaskan Politisi dari Fraksi PKS ini, saat mengunjungi SMAN 3 Demak, pihaknya mendapati satu keistimewaan

menurut Ledia, selain harus diapresiasi, juga dukungan untuk pembinaannya.

Selain itu dalam kunjungannya ke Demak, tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI juga menerima masukan berupa permintaan renovasi ruang kelas di salah satu sekolah di Demak, Jawa Tengah. Konon, menurut informasi dari kepala sekolah dan guru SMP tersebut, kelas tersebut sudah 25 tahun tidak dilakukan perbaikan atau renovasi. Tentu kondisinya cukup memprihatinkan.

“Kami tentu sangat mendukung

penambahan fasilitas. Bisa melalui DAK (dana alokasi khusus) Fisik. Namun DAK Fisik itu basisnya harus ada proposal dari daerah. Artinya sekolah bisa memasukannya kepada dinas, kemudian oleh daerah akan diajukan ke pemerintah pusat. Ini yang tidak diketahui oleh sekolah-sekolah. Jadi silahkan saja ajukan proposal permintaan berbagai fasilitas dan renovasi ke Dinas, kemudian ke daerah. Dan daerah yang akan mengajukan ke pusat,” papar Ledia. (ayu/aha)

Komisi X Ingatkan Kemendikbud Ristek Cermat dan Hati Hati Susun Materi Buku Sekolah

Belum lama ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)

menarik peredaran buku cetak Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) SMP kelas 7 untuk direvisi, lantaran ada kesalahan materi. Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR RI mengingatkan Kemendikbud Ristek untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun materi buku-buku pelajaran sekolah.

“DPR menyangkan sekaligus mengingatkan Kemendikbudristek untuk selektif dalam menentukan penulis buku, apapun jenis bukunya, terutama yang akan menjadi pegangan wajib bagi siswa,” kata Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam keterangan pers yang diterima Parlemen, Jumat (29/7/2022).

Diketahui, kesalahan materi dari buku PPKn SMP kelas 7 yakni mengenai konsep Ketuhanan dan Trinitas dalam agama Kristen. Permasalahan ini ramai disorot di media sosial hingga membuat sejumlah pihak melontarkan protes. Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan ini pun meminta Kemendikbud Ristek melibatkan pakar dari berbagai latar belakang untuk setiap penyusunan materi pembelajaran.

Hal ini, kata Andreas, guna menghindari terjadinya kekeliruan materi di buku pelajaran sekolah maupun hal hal yang memicu kecurigaan antar-pemeluk agama. “Khusus menyangkut agama, sebaiknya melibatkan penulis yang benar-benar mempunyai keahlian dalam agama dan sebaiknya dari agama yang sama dengan bidang keagamaan

”
**KHUSUS
MENYANGKUT
AGAMA,
SEBAIKNYA
MELIBATKAN
PENULIS YANG
BENAR-BENAR
MEMPUNYAI
KEAHLIAN
DALAM
AGAMA**



Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P Dapil NTT IFoto: Devi/nvl

yang ditulis,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

Andreas pun mengingatkan, penyusunan buku pelajaran harus melalui proses verifikasi sebelum resmi diedarkan. Ia mengungkap, buku pelajaran tidak boleh asal dibuat karena bisa berdampak fatal. “Menulis tentang agama sebaiknya juga tidak menyangkut dogma dalam agama tetapi lebih menyangkut pemahaman informasi umum tentang agama tertentu,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa

Tenggara Timur (NTT) I itu.

Sekalipun dalam proses revisi buku PPKn kelas 7 itu Kemendikbud Ristek akan melibatkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Andreas khawatir muatan materi sebelumnya telah diterima siswa, sehingga memungkinkan terjadinya informasi sesat. “Seharusnya Kemendikbud melibatkan pakar atau ahli yang memang kompeten di bidangnya sejak awal penyusunan buku materi pelajaran,” ungkap Andreas. (hal/sf)

Hetifah Kecam Perundungan Pelajar SD Tasikmalaya

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan keras perundungan yang menimpa seorang pelajar SD asal Tasikmalaya berinisial F. Diketahui, peristiwa tersebut membuat bocah kelas 6 sekolah dasar tersebut mengalami depresi hingga meninggal dunia setelah dipaksa menyetubuhi kucing. Meski kabarnya keluarga pelaku sudah meminta maaf kepada keluarga korban, Hetifah mendorong agar pelaku tetap ditindak secara hukum. “Meskipun para pelaku masih di bawah umur, saya berharap ada langkah tegas bagi pelaku, baik dari sekolah, rehabilitasi ataupun pidana, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hetifah belum lama ini.

”

KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HARUS BERPERAN LEBIH AKTIF DALAM MENGAWASI ANAK-ANAK,

Menurutnya, nyawa seorang anak telah melayang, maka harus ada konsekuensi dan tanggung jawab dari pelaku dan keluarga pelaku. Legislator Partai Golkar itu juga menyayangkan instansi sekolah yang sangat lalai.

Sebab, instansi pendidikan di seluruh Indonesia seharusnya bertanggung jawab guna memastikan lingkungan pendidikan aman, nyaman, dan bebas bullying atau perundungan. “Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan harus berperan lebih aktif dalam mengawasi anak-anak,” tegasnya.

Di sisi lain, Hetifah peristiwa perundungan yang kerap terjadi berulang membutuhkan keseriusan sinergi semua pihak. “Saya mendorong agar segera ada rembuk bersama dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan (kab/kota), sekolah, KPAL, persatuan guru, persatuan/komite orang tua siswa, dan persatuan siswa terkait hal ini. Harus ada solusi bersama,” tandasnya. (hal,rnm/aha)



Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur

Komisi X DPR Nilai Sarpras dan Guru adalah 2 Ujung Tombak Bentuk Pendidikan Bermutu

Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menyatakan ada dua aspek yang merupakan ujung tombak perbaikan mutu pendidikan Indonesia ke depan, yaitu sarana prasarana dan guru. Keduanya memiliki korelasi yang cukup erat dalam membangun pendidikan yang bermutu.

"Sekarang kita dapatkan masalah cukup serius di guru, yaitu masalah ketercukupan, ketersebaran dan kompetensi juga kesejahteraan, mereka padahal guru itu yang paling depan menjadi ujung tombak bagi mutu pendidikan kita," ujar dia.

"Dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yaitu sarana prasarana dan guru, Kalau kurikulum dia dinamis dia berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu wajar enggak terlalu masalah tapi kalau gurunya oke sarana prasarana kondusif dan fasilitatif jadilah anak-anak kita insha Allah," katanya menambahkan.

Hal itu diungkapkan usai melakukan peninjauan ke SDN 06, SMPN 02 dan SMAN 03 Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat, (15/07/2022). Selanjutnya, Fahmi juga menuturkan gedung SMAN 03 Kota Salatiga dahulu adalah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada masa Belanda.

Hal ini menurutnya bahwa zaman dahulu ternyata meskipun Belanda menjajah Indonesia, namun dia memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik atau guru pada masa itu, yang menurut Fahmi hal itu merupakan pendidikan yang mewah bagi seorang guru.

"Mewah dalam artian terfasilitasi dengan baik dan kita juga tahu bahwa guru-guru kita di zaman dulu itu hebat-hebat, ini juga catatan buat kita apalagi

**”
GURU DAN SARANA MEMILIKI KORELASI YANG CUKUP ERAT DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN YANG BERMUTU.**

Fahmi Alaydroes,
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dapil Jawa Barat V



nanti di tengah-tengah suasana upaya untuk memperbaiki RUU Sisdiknas, maka perhatian kita kepada upaya menghadirkan guru yang bagus yang berkualitas ini harus menjadi prioritas nomor satu," ujarnya.

Terkait sarana prasarana, Fahmi juga menyoroti bangunan yang dimiliki sekolah-sekolah yang dikunjungi oleh Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI adalah bangunan peninggalan zaman Belanda. Lagi-lagi menurutnya, dari sarana prasarana bangunan sekolah yang merupakan peninggalan Belanda yang memiliki kesan kokoh, luas dan asri dengan penghijauan di sekitarnya. Hal ini membuktikan Pemerintah Belanda pada masa itu sangat memperhatikan sarana dan prasarana bagi sekolah dan serius membangun pendidikan pada masa itu.

Oleh karena itu dirinya meminta Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dapat fokus dan serius membenahi fasilitas sekolah-sekolah di Indonesia. "Menurut saya ini aspek yang barangkali perlu benar-benar kita perhatikan di tengah-tengah problematika kita, dimana satu juta lebih ruang kelas rusak ya di seluruh Indonesia, bagaimana anak ingin mendapatkan pengalaman belajar yang kondusif ya yang bagus ketika sarana prasarananya menjadi menjadi bermasalah," katanya.

"Jadi ini impresi pertama yang saya dapatkan seperti itu. Ini harus menjadi catatan keras buat Kemendikbud dan pemerintah pada umumnya agar kita benar-benar memberikan perhatian kepada fasilitas pendidikan," ucapnya menegaskan. (Republika.co.id)

Buku cetak Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) SMP kelas 7 belum lama ini ditarik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk direvisi lantaran ada kesalahan materi. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengingatkan, persoalan serupa juga sudah pernah terjadi sebelumnya, meski dalam konteks materi yang berbeda.

Sebab, permasalahan terkait materi buku pelajaran yang keliru bukan hanya terjadi pada buku PPKn soal konsep Trinitas dalam agama Kristen saja. “Penyusunan materi pelajaran seharusnya dikerjakan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Tidak boleh hanya sekadar proyekan yang menguntungkan sekelompok orang secara materi,” ujar Andreas dalam keterangan pers yang diterima Parlemen, Jumat (29/7/2022).

“Kekeliruan dalam buku PPKn merupakan fenomena gunung es dari buruknya proses penyusunan buku materi pelajaran yang dilakukan Kemendikbud,” sambungnya. Untuk itu, ia meminta seluruh buku materi pelajaran yang telah dicetak Kemendikbud Ristek untuk dikaji ulang dan diteliti secara seksama. Andreas

Buku Pelajaran Ditarik, Andreas Hugo: Penyusunan Materi Seharusnya Dikerjakan Secara Ilmiah

menyebut, bukan tidak mungkin ada kekeliruan lainnya di buku pelajaran siswa sekolah bila menilik permasalahan yang terjadi ini.

“Kalau Pemerintah Pusat saja sudah menyampaikan ilmu pengetahuan yang tidak tepat, bukan tak mungkin generasi muda masa depan bangsa Indonesia bakal memiliki pemahaman sesat dalam memahami agama-agama yang ada di Indonesia,” urai legislator asal daerah pemilihan (dapil) NTT I ini.

Di akhir, ia pun mengungkapkan bahwa sikap toleran serta saling menghormati antar-pemeluk agama berbeda hanya bisa ditumbuhkan jika ada

pemahaman yang tepat dari agama-agama yang ada di Indonesia. “Sesat pikir akibat kekeliruan pelajaran dapat berakibat fatal bagi kebhinekaan serta persatuan dan kesatuan Indonesia,” tutup politisi PDI-Perjuangan tersebut. (hal/sf)

”

PENYUSUNAN MATERI PELAJARAN SEHARUSNYA DIKERJAKAN SECARA ILMIAH DAN BERTANGGUNG JAWAB.

Andreas Hugo Pareira,
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P
Dapil NTT I





Komisi X Minta Calon Guru PPPK Ikuti Prosedur yang Berlaku

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin meminta kepada masyarakat terutama guru dan pegawai perpustakaan honorer yang ingin segera diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Mengingat, tandas Djohar, jika guru mengurus di luar jalur prosedur, Komisi X DPR RI pun tidak mungkin dapat membantu.

"Kita harapkan, mereka ikuti prosedur yang ada untuk bisa diangkat jadi guru PPPK. Jadi saya katakan, jangan ada yang tidak ikuti prosedur, karena tidak mungkin kita membantu jika mereka tidak berada di jalur," tegas Djohar usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Pj. Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi dan mitra kerja Komisi X DPR RI di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).

Permasalahan lainnya yang disuarakan stakeholder di Salatiga, yaitu soal penerimaan murid baru atau penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dimana hampir seluruh daerah yang dikunjungi Komisi X DPR RI merasa keberatan dan ketidakadilan dengan adanya sistem zonasi. Djohar menegaskan, pihaknya akan mendorong kebijakan tersebut untuk ditinjau ulang dan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi seluruh pihak.

"Ini jadi kajian kita, akan kita bahas bagaimanapun perbaikan-perbaikan ke depan harus kita lakukan, karena jika melihat masalahnya sangat kompleks. Bukan satu dua masalah. Masing-masing punya masalah, maka ini harus kita inventarisir semua, dan akan kita bahas bersama (dengan mitra kerja). Sehingga nanti kita akan dapat suatu keputusan yang pasti lebih baik dari sekarang," ujar politisi Partai Gerindra tersebut. Aspirasi selanjutnya, terkait dengan pegawai teknis perpustakaan, yang

sangat berharap dapat memiliki kesempatan yang sama dengan para guru honorer, untuk dapat diangkat menjadi PPPK ataupun PNS. Djohar berharap pegawai honorer perpustakaan dapat memiliki kesempatan yang sama. Sementara terkait perguruan tinggi, Djohar



JANGAN ADA YANG TIDAK IKUTI PROSEDUR, KARENA TIDAK MUNGKIN KITA MEMBANTU JIKA MEREKA TIDAK BERADA DI JALUR

Djohar Arifin,
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi Partai Gerindra
Dapil Sumatera Utara III



meminta agar tidak berkuat pada akreditasi, melainkan meningkatkan inovasi, meningkatkan skill mahasiswa, sehingga memiliki prestasi, yang dimiliki perguruan tinggi dan mahasiswa di dalamnya. "Jadi inovasi-inovasilah, bagaimana mereka bisa menjual ilmu-ilmu mereka, dan bagaimana mereka bisa menjual produk-produk mereka bukan hanya lokal nasional juga internasional jadi ada peluang tinggi mereka dapatkan, jadi saya harapkan inovasi-inovasi perlu digalakkan oleh setiap perguruan tinggi agar mereka bisa survive jangan hanya terpaku kepada akreditasi-akreditasi," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu.

Yang kedua, Sodik mengajak seluruh pihak untuk membudayakan kolaborasi, kolaborasi tidak hanya mengandalkan kepada dana pemerintah, tapi kolaborasi dengan berbagai kalangan. Yang ketiga, mengingat saat ini zamannya adalah zaman digital maka harus ada digitalisasi, dimana di dalamnya termasuk digitalisasi sistem dan digitalisasi marketing. "Tiga prinsip ini, yang saya kira harus dipakai oleh sebuah lembaga, termasuk juga oleh Pemerintah Daerah, yaitu inovasi kolaborasi dan digitalisasi," tutur Sodik. Legislator dapil Jawa Barat I itu

mengaku, aspirasi yang disampaikan mitra kerja akan dijadikan amunisi untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan Pemerintah. Mengingat DPR RI adalah legislator bukan eksekutor, sehingga masukan-masukan seperti ini sangatlah penting bagi DPR RI, sehingga dirinya menegaskan sekali lagi, di zaman milenial saat ini tiga prinsip kerja di atas menjadi sangat penting untuk segera dikembangkan.

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Salatiga turut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Adriana Dondokambey dan Vanda Sarundajang dari F-PDI Perjuangan, Muhamad Nur Purnamasidi (F-PG), Sakinah Aljufri (F- PKS), Yoyok Sukawi (F-PD), Haerul Amri dan Syamsul Luthfi dari F-Nasdem, dan Mitra Fakhruddin (F-PAN). (ndy/sf)

UU Pendidikan dan Layanan Psikologi Disahkan DPR, Begini Respons Desy Ratnasari

Anggota DPR RI Fraksi PAN, Desy Ratnasari mengaku bersyukur karena RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi hari ini resmi telah disahkan. Sebagai legislator yang sejak 2019 sudah mengusulkan RUU Praktik Psikologi, yang kemudian diubah judulnya menjadi UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, Desy mengaku berterimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung RUU ini, mulai dari proses pembuatan naskah akademik, draft RUU, proses pembahasan hingga akhirnya disahkan.

"Alhamdulillah harapan semua pihak yang selama ini berkecimpung di dunia psikologi akhirnya terwujud. Keberhasilan ini tentu berkat kemudahan yang diberikan Allah SWT, dan dukungan semua pihak," kata Desy dalam keterangannya, Kamis (7/7).

Sejumlah pihak yang mendukung RUU PLP antara lain pimpinan Badan Legislasi DPR, anggota Baleg, khususnya Panja RUU Praktik Psikologi. Selanjutnya Tenaga Ahli Baleg, pimpinan Komisi X, Kapoksi Komisi, anggota Komisi X, Fraksi PAN, HIMPSI, asosiasi dan ikatan psikologi, AP2TPI, pakar psikologi, dan Tim Teknis Komisi X.

Desy mengatakan, isi UU Pendidikan dan Layanan Psikologi antara lain mencakup semua aktifitas dunia psikologi dari hulu ke hilir.

"Cakupannya tentang standar pendidikan psikologi, standar layanan psikologi, organisasi profesi, psikolog asing dan psikolog lulusan luar negeri, hak dan kewajiban psikolog dan klien, hingga partisipasi psikolog dan masyarakat," kata Desy.

Sebagai pengusul awal, Desy mengaku dunia psikologi bukan hal baru buat dirinya. Ia merupakan psikolog yang tercatat sebagai lulusan S1 Psikologi

Unika Atma Jaya Jakarta dengan skripsi yang membahas tentang pendidikan. Selain itu, Desy juga mempunyai dua gelar master yakni S2 Psikologi Terapan Manajemen SDM Universitas Indonesia dan S2 Magister Profesi Psikologi Bidang Industri Organisasi Unika Atma Jaya Jakarta.

Saat ini, Desy merupakan kandidat Doktor dengan topik disertasi tentang kepemimpinan perempuan di dunia politik Unika Atma Jaya Jakarta. (RMOLjakarta)

”
DESY RATNASARI BERSYUKUR KARENA RUU PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI HARI INI RESMI TELAH DISAHKAN.

Desy Ratnasari, Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil Jawa Barat IX



Bramantyo Suwondo: Minta Semua Pihak Terapkan Prokes Ketat di Sekolah



Bramantyo Suwondo, Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrat Dapil Jawa tengah VI

**”
SAYA
MENDORONG
AGAR
SELURUH WALI
MURID, GURU
DAN TENAGA
PENDIDIKAN
UNTUK CEPAT
MELAKSANAK
AN BOOSTER
VAKSIN
COVID-19**

Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo, meminta semua pihak seperti murid, guru, dan wali murid harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat di sekolah agar tidak ditemukannya kasus Covid-19. Dia mendorong semua pihak terlibat dalam kegiatan di sekolah harus segera ikut melakukan vaksin booster untuk dapat menekan penularan risiko Covid-19. "Saya mendorong agar seluruh wali murid, guru dan tenaga pendidikan untuk cepat melaksanakan booster vaksin Covid-19 agar dapat menekan risiko penularan Covid-19 sekaligus menjaga kesehatan seluruh anggota pendidikan di satuan pendidikan," kata Bramantyo di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Hal itu dikatakannya terkait langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali menutup sementara beberapa

sekolah akibat ditemukannya kasus Covid-19. Bramantyo menilai tidak ada masalah jika di suatu sekolah ditemukan adanya Covid-19 dengan menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) demi menjaga kesehatan semua pihak.

Namun menurut dia, apabila semua pihak sudah melakukan vaksin booster dan tetap menerapkan prokes ketat, proses pembelajaran tatap muka (PTM) akan berjalan lancar, sehingga harus dilakukan agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa terjaga.

Camat Cilandak Djaharuddin menjelaskan kronologi temuan kasus di sekolah tersebut yaitu pada Kamis (14/7/2022) terdapat laporan siswa kelas VIII B terkonfirmasi positif Covid-19. Siswa tersebut masih masuk sekolah sehari sebelumnya, dan Puskesmas setempat langsung melakukan penelusuran kontak.

"Mengalihkan kegiatan belajar menjadi daring untuk waktu yang singkat yaitu dalam beberapa hari menurut saya bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik untuk sementara waktu," ujarnya.

Dia menjelaskan, apabila situasi sudah kondusif, PTM sudah bisa dilaksanakan kembali, untuk memastikan kualitas pendidikan peserta didik tetap terjaga juga di masa pandemi.

Sebelumnya diberitakan, penutupan sementara sekolah akibat temuan kasus COVID-19 di Jakarta kembali dilakukan di tengah peningkatan kasus COVID-19 dunia, setelah sebelumnya melandai. Satu sekolah di Jakarta yaitu SMP Negeri 85 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan di-lockdown selama 10 hari sejak tanggal 18 hingga 28 Juli 2022. ([Republika.co.id](https://www.republika.co.id))

Lestari Moerdijat Tuntut Keterampilan Mahasiswa Adaptif dengan Perubahan Zaman

Mahasiswa harus mampu memiliki keterampilan yang relevan dengan berbagai perubahan yang terjadi. Sehingga dituntut selalu menjadi pembelajar yang baik untuk meningkatkan keterampilan sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan. "Berbuat kesalahan adalah hal yang wajar dalam upaya menuju peningkatan keterampilan. Terpenting bagaimana kita segera memperbaiki kesalahan itu dan memiliki keterampilan yang mampu menjawab tantangan zaman," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci pada Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa

Politeknik se-Indonesia yang diselenggarakan di Politeknik Balekambang di lingkungan Pondok Pesantren Roudlotul Muftadiin Balekambang, Jepara, Sabtu, 23 Juli 2022.

Sebagai generasi penerus bangsa, kata Lestari, mahasiswa dituntut memiliki keterampilan dan kemampuan yang mumpuni dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi.

Karena, jelas Rerie, sapaan karibnya, di era disrupsi saat ini perubahan itu sendiri, baik terjadi di sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta dampak pandemi dalam tiga tahun terakhir. Generasi muda, tambahna, harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.

(Medcom)

”

AHASISWA HARUS MAMPU MEMILIKI KETERAMPILAN YANG RELEVAN DENGAN BERBAGAI PERUBAHAN YANG TERJADI.

Lestari Moerdijat, S.S., M.M.
Pimpinan MPR RI/Anggota Komisi X
Fraksi Partai NasDem
Dapil JAWA TENGAH II





Komisi X DPR RI menyayangkan kabar ramainya sekolah negeri mewajibkan dan bahkan memaksa siswinya memakai jilbab.

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menilai, seharusnya sekolah negeri tak boleh mewajibkan atau melarang penggunaan jilbab saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

"Sangat menyayangkan kejadian ini. Untuk sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau melarang pemakaian jilbab untuk KBM," kata Ali saat dihubungi Tribun, Rabu (3/8/2022).

Legislator Partai Gerindra itu juga menyinggung, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Aturan itu sebelumnya diteken oleh Menteri Agama (Menag), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada 2021, namun sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada 3 Mei 2021.

Ali menilai, aturan tersebut seharusnya perlu dibahas kembali, untuk mengantisipasi peristiwa tersebut terulang kembali.

"Pernah terjadi di Padang, di Bantul dan beberapa daerah lain. Ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya, hendaknya pihak sekolah juga ikut bertanggung jawab terhadap oknum guru yang melakukan hal ini," tandasnya.

Sekadar informasi, belakangan ramai diberitakan sekolah negeri memaksa siswinya untuk menggunakan jilbab.

Misalnya seperti dialami oleh seorang siswi kelas X SMAN 1 Banguntapan Bantul, yang mengalami depresi usai dipaksa mengenakan jilbab di sekolahnya.

Komisi X DPR Sayangkan Kabar Ramainya Sekolah Negeri Paksa Siswi Pakai Jilbab

Menurut Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) siswi itu mengaku dipaksa memakai hijab sebagai salah satu bagian seragam wajib ketika Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Yuliani, koordinator AMPPY selaku pendamping siswi menceritakan, peristiwa bermula ketika siswi tersebut menjalani hari pertama MPLS tanggal 18 Juli 2022. Siswi itu masuk seperti biasa tanpa mengenakan hijab.

Setelahnya, siswi berusia 16 tahun itu menerima pesan undangan panggilan ke ruang Bimbingan dan Konseling (BK) via WhatsApp.

"Kemudian tanggal 19 (Juli) menurut WA di saya ini, anak itu dipanggil di BP (BK) diinterogasi tiga guru BP. Bunyinya itu, kenapa enggak pakai hijab?" kata Yuli di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY, Sleman, Jumat (29/7).

Selain di Yogyakarta, kasus serupa terjadi di SMP Negeri kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan bulan Juli silam.

Siswi berinisial R (13), mengaku ditegur oleh gurunya lantaran tidak memakai jilbab. Peneguran itu terjadi beberapa kali terhadap R.

"Cuman namanya anak kecil, dia tuh nangkepnya kok gue kayak dipaksa pakai kerudung di sekolah," kata kakak korban berinisial DN (24) saat dikonfirmasi TribunJakarta.com pada Selasa (2/7/2022).

Ali Zamroni.
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Dapil Banten I

”
UNTUK SEKOLAH NEGERI TIDAK BOLEH MEWAJIBKAN ATAU MELARANG PEMAKAIAN JILBAB UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)



Rano Karno atau yang akrab di panggil si Doel kembali ke Banten. Kedatangan Rano Karno ke Banten ialah sebagai anggota Komisi X DPR RI.

Rano Karno dalam kesempatan ini mendatangi Universitas Faletahan Serang untuk memberikan Kartu Indonesia Pintar bagi 150 Mahasiswa dan bantuan untuk pembangunan Laboratorium sebesar Rp498 juta bagi Universitas Faletahan, Rabu (13/7/2022).

Selain penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan bantuan dalam acara tersebut mantan orang nomor 1 di Banten tersebut juga memberikan motivasi bagi para mahasiswa untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin selama belajar di perguruan tinggi serta berpesan agar berguna dan berperan untuk kemajuan Banten kedepannya.

“Menyalurkan aspirasi KIP dan juga selain 8 semester gratis juga tiap bulan mendapatkan bantuan. Pesan saya kepada anak-anak, selesaikan kuliah tepat waktu. Jangan sampai menjadi gagal, supaya jerih payah saya sebagai DPR yang menjangkau aspirasi bermanfaat,” ungkap Rano Karno yang juga Politisi PDI Perjuangan ini.

Rano Karno
Anggota Komisi X
Fraksi PDI-P
Dapil BANTEN III



Salurkan Aspirasi Pendidikan, Si Doel Datang ke Banten

”

JANGAN SAMPAI MENJADI GAGAL, SUPAYA JERIH PAYAH SAYA SEBAGAI DPR YANG MENJANGKAU ASPIRASI BERMANFAAT

Mantan Gubernur Banten yang saat ini menjadi anggota Komisi X tersebut juga berharap semoga Banten bangkit setelah pandemi COVID-19, serta dengan ditunjang Tol Serang-Panimbang yang telah dapat digunakan juga berharap perekonomian serta pembangunan di Banten segera merata.

Setelah masa pandemi ini selesai, pembangunan di Banten akan lebih cepat. Terlebih lagi sudah dibangunnya Tol Serang-Panimbang,” ujarnya.

Selain di Universitas Faletahan, ia juga sudah mendorong KIP di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Ahmad Dahlan, UNCA.

“Ada sekitar 7 universitas yang kita dorong untuk menerima KIP melalui aspirasi,” ungkap Rano.

Sementara itu Muhamad Zidan Nugraha, Presma Universitas Faletahan menyampaikan apresiasinya terhadap peran pemerintah berkontribusi bagi mahasiswa, bahwa dengan kehadiran Rano Karno adalah angin segar bagi para mahasiswa setelah pandemi COVID-19 serta sebagai recovery ekonomi bagi mahasiswa.

Tentunya ini juga menjadi inspirasi terhadap sosok Rano Karno atas perjuangannya untuk Banten. Serta figurinya terkait perjalanan hidupnya mulai dari nol hingga menjadi gubernur,” ungkapnya.

(Banpos)

Hetifah Sjaifudian Komitmen Perjuangkan Tambahan Anggaran Kemenpora 2023

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di tahun 2023. Diketahui Kemenpora mengajukan anggaran sebesar Rp1,6 triliun dengan usulan tambahan sebesar Rp3 triliun. Usulan tambahan tersebut akan dialokasikan dalam penyelenggaraan beberapa event olahraga internasional dimana Indonesia menjadi tuan rumah.

"Dukungan anggaran adalah komitmen konkret dari pemerintah. Fraksi Partai Golkar, menerima dan akan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh di Badan Anggaran guna sukseskan target prestasi

olahraga Indonesia dan implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)," ujar Hetifah dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora Zainudin Amali, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Hetifah juga mengapresiasi Kemenpora atas capaian prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Ia mengaku optimis bahwa Indonesia akan mencetak berbagai prestasi di tahun 2023.

"Tidak perlu diragukan lagi bahwa selama 2 tahun terakhir prestasi Indonesia di level internasional penuh dengan gebrakan. Dengan banyaknya event internasional yang digelar di tahun 2023, saya optimis Indonesia akan mencetak lebih banyak prestasi.

Semakin sering berpartisipasi dalam event, tentu akan memberi multiplier effect terhadap kapasitas atlet kita," tandas politisi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya Menpora Zainudin Amali menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pendanaan keikutsertaan Indonesia ke beberapa single event dan multi event olahraga internasional. Zainudin Amali pun dalam rapat tersebut beberapa agenda olahraga Indonesia mendatang. Beberapa agenda tersebut yakni event FIFA World Cup U-20 2023, FIBA World Cup 2023, World Beach Games, FORNAS (Festival Olahraga Rekreasi Nasional), Peparpenas (Pekan Paralimpik Pelajar Nasional).

”

SEMAKIN SERING BERPARTISIPASI DALAM EVENT, TENTU AKAN MEMBERI MULTIPLIER EFFECT TERHADAP KAPASITAS ATLET KITA

Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur



Sofyan Tan Apresiasi Torehan Prestasi Kemenpora Meski Anggaran Terbatas

Anggota Komisi Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas berbagai upaya yang dilakukan di SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam, sehingga para atlet Indonesia dapat menorehkan prestasi, meski dengan dana yang sangat terbatas. Bahkan Indonesia menempati juara 3 di klasemen akhir. Sementara juara 1 diperoleh tuan rumah, Vietnam, dan juara 2 disabet Thailand. Sofyan Tan mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainuddin Amali dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Beparekraf) RI Sandiaga Uno, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Meski begitu dirinya menilai hal tersebut tidak boleh dibiarkan. Hanya karena anggaran dana terbatas,

sehingga Indonesia tidak bisa menjadi juara pertama di kandang lawan.

Sehingga menurutnya, kalau Indonesia ingin berprestasi lebih hebat, Indonesia perlu memiliki motivasi untuk bisa meraih juara sekalipun bukan tuan rumah. "Dan saya punya keyakinan, peta besar telah disiapkan oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Saya berharap ini sebagai dasar menuju prestasi yang gemilang di kemudian hari," tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Ia menilai, walaupun anggaran Kemenpora di RKAKL tahun 2023 hanya sekitar Rp1,6 triliun, tapi dengan usulan program yang disampaikan Kemenpora, akan sangat penting untuk menjadikan Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dari beberapa event

yang digelar. "Sehingga Fraksi PDI-P memberikan dukungan untuk diperjuangkan lebih lanjut dan kami akan memperjuangkan agar tambahan Rp3 triliun ini bisa terwujud," lanjutnya

Tidak jauh berbeda dengan itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I tersebut juga mendukung dan memberikan perhatian kepada Kemenparekraf/Beparekraf untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. Kebangkitan itu menurutnya juga termasuk dengan "Sektor-sektor yang disampaikan di dalam hal ini adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kuat di dalam pariwisata, menumbuhkan perekonomian terutama ekonomi kreatif yang memang banyak dilakukan oleh para UKM tentu ini akan memberikan dampak yang positif bagi ekonomi kita," terang Sofyan Tan. Ia pun berharap Kemenpora dengan Kemenparekraf dapat saling bersinergi dalam beberapa program seperti World Cup dan FIFA dapat mendatangkan wisatawan mancanegara.

”

**INDONESIA
PERLU
MEMILIKI
MOTIVASI
UNTUK BISA
MERAH
JUARA
SEKALIPUN
BUKAN TUAN
RUMAH**

Sofyan Tan
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi PDI-P Dapil Sumatera Utara I





Illiza Sa'aduddin: Perlu Perhatian Proporsional dan Profesional bagi Cabang Prioritas

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamil meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) untuk memberikan perhatian yang proporsional dan profesional bagi cabang-cabang olahraga (cabor) prioritas meski dengan dukungan anggaran yang terbatas. Hal tersebut diungkapkannya setelah Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora RI terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga (RKP K/L) Tahun 2023.

"Kami memberikan masukan agar ke depan perhatian cabang olahraga prioritas menjadi lebih proporsional dan profesional. Event internasional, beberapa hal yang harus dilakukan, pembinaan yang lebih maksimal ini harapan kita," ujar Illiza usai mengikuti rapat kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

"Kemenpora ini walaupun anggarannya sedikit pengaturannya baik, kebijakannya fokus sehingga ya Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Nanggroe Aceh Darussalam I tersebut juga memberikan apresiasi bagi penerapan skala prioritas yang dilakukan oleh Kemenpora, terutama terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam gelaran SEA Games 2021 lalu dan terbatasnya dukungan anggaran kepada kontingen Indonesia. Pada pesta olahraga Asia tenggara di Vietnam pada 12-23 Mei lalu kontingen Indonesia berlaga di 32 cabor dari total 40 cabor yang dipertandingkan. Kita lihat lah jumlah atlet yang dikirimkan nggak terlalu banyak hanya 400



AGAR KE DEPAN PERHATIAN CABANG OLAHRAGA PRIORITAS MENJADI LEBIH PROPORSIONAL

Illiza Sa'aduddin Djamil
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi PPP Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I

sekian atlet sama dengan (yang dikirim oleh) Singapura gitu ya, tapi prestasi kita jauh di atas. Kemudian artinya, apa yang beliau tentukan, kebijakan yang belum ambil ini sudah on the track sudah tepat sasaran apalagi kalau didukung oleh uang yang cukup," tambahnya sambil berkelakar.

Dalam rapat kerja tersebut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga berharap di tengah euforia raih prestasi saat ini, Kemenpora tetap bisa menjalankan skala prioritas yang telah ditempuh. Terlebih, atas raih prestasi yang telah diukir, beberapa cabang olahraga olimpik mendapatkan tambahan kesempatan untuk berlaga di gelaran-gelaran dunia maupun regional.

"Apalagi di tahun 2023 ke depan ini momentum semua olahraga olimpik itu juga akan mendapatkan tambahan tiket, baik di kejuaraan dunia maupun di kejuaraan Asia. Sementara, selama ini pembiayaan keberangkatan itu kan hanya dua kegiatan. Nah bisa bayangkan kalau ada 4 (kegiatan). 1 cabang menambah 4 gitu, kayak panahan. Dan seluruh dunia juga dari

satu event dunia ke event yang lain. Nah dalam kondisi anggaran seperti ini ya mudah-mudahan masih ada peluang untuk bisa memberikan tambahan," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Illiza juga sempat menyinggung masalah konsistensi pembinaan atlet secara jangka panjang melalui pemusatan latihan nasional. Menurutnya hal ini dapat mendukung realisasi Desain Besar Olahraga Nasional yang diinisiasi oleh Menpora. "Mudah-mudahan untuk



yang olahraga prestasi, pelatnas itu bisa pelatnas jangka panjang baik yang seniornya maupun yang junior. Ini penting dilakukan agar DBON ini bisa berjalan tepat target yang ingin dicapai," tambah Ketua Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) itu.

Dilansir dari situs resmi Kemenpora, salah satu muatan dalam Desain Besar Olahraga Nasional adalah menetapkan 14 cabang olahraga prioritas/unggulan yang akan diikutsertakan dalam event olahraga internasional Olimpiade dan Paralimpiade, antara lain; bulu tangkis, angkat besi, panahan, atletik, menembak, panjat tebing, senam artistik, balap sepeda, renang, dayung, karate, taekwondo, wushu dan pencak silat. Komposisi olahraga tersebut bisa berubah dengan sistem degradasi dan promosi. "Tentang cabor-cabor olimpiade memang itu kita akan lakukan pembinaan jangka panjang dan insyaAllah mudah-mudahan kita bisa lakukan dengan sistematis walaupun tetap kita perhatikan efisiensinya" ujar Menpora, Zainudin Amali setelah menerima pandangan Anggota Dewan.

Dua suporter diketahui tewas saat hendak menyaksikan pertandingan Piala Presiden 2022 dalam laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/6/2022) lalu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan kasus kematian suporter sepak bola di Indonesia sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

“Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Kami mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas kematian dua suporter di Stadion GBLA diseret ke ranah hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara pidana,” ujar Huda dalam keterangan pers yang diterima Parlemen, Sabtu (18/6/2022).

Dalam kasus dua bobotoh tersebut, pihak berwajib harus memanggil para penanggung jawab pertandingan Piala Presiden 2022. Dia mengaku mendapatkan banyak laporan dari kelompok suporter terkait peristiwa menyedihkan tersebut. “Mereka harus dimintai keterangan dan jika ada unsur kelalaian yang memicu tewasnya dua Bobotoh tersebut mereka harus dijerat dengan Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang memicu hilangnya nyawa orang lain,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Huda menilai, kejadian tersebut diduga terjadi karena ada unsur kelalaian penyelenggara karena tampak tidak ada persiapan matang mengantisipasi ledakan jumlah penonton yang hadir dalam laga akbar tersebut. “Kami menerima informasi terkait bobolnya stadion sejak sebelum pertandingan dimulai. Lalu ada ketidaksigapan Panpel saat terjadi kerumunan begitu rupa sehingga memicu korban jiwa,” katanya.

Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

”

TIDAK ADA SEPAK BOLA SEHARGA NYAWA MANUSIA



Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Barat VII

Huda menilai bahwa kasus suporter yang meninggal selama ini cenderung dianggap sebagai kecelakaan tanpa diusut pemicunya. Sehingga ia menegaskan, sudah saatnya jeratan pasal pidana diberikan kepada mereka yang lalai saat menyelenggarakan pertandingan sepak bola di Indonesia. Dia mengungkapkan peristiwa kematian suporter sepak bola di Indonesia seperti lagu lama yang terus berulang.

“Akibatnya kasus kematian suporter di Indonesia terus-menerus berulang tanpa diiringi upaya sistematis untuk meminimalkan potensi pemicunya. Di sisi lain, belum nampak upaya serius untuk membenahi manajemen pengelolaan sepak bola termasuk perlindungan terhadap suporter,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut.

Data Save Our Soccer (SOS)

menunjukkan, setidaknya terdapat 76 suporter meninggal selama periode 1995 hingga 2018 karena berbagai sebab. Mulai dari terhimpit dan terjatuh di stadion, kecelakaan di jalan raya, hingga dikeroyok warga dan suporter lawan. Saat ini, lanjut Huda, dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sudah terdapat pasal terkait perlindungan suporter ini.

Meski demikian, beleid tersebut masih membutuhkan aturan turunan agar bisa diterapkan di lapangan. “Kami berharap pemerintah segera merumuskan aturan turunan ini untuk memastikan keselamatan suporter baik sebelum, saat, dan sesudah pertandingan. Sekali lagi tidak ada olahraga yang seharga nyawa, termasuk sepak bola. Kami berharap agar kejadian memilukan tewasnya suporter sepak bola tidak lagi terjadi di Indonesia,” pungkasnya.



Timnas Sepakbola Amputasi Butuh Dukungan Konsisten



Timnas Sepakbola Amputasi tengah berlatih di Sports Club Serena Mansion, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal.

Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan, pemerintah untuk konsisten mendukung Timnas Sepakbola Amputasi (Garuda INAF). Lantaran, Garuda INAF telah berhasil mencetak sejarah pertama kalinya menembus Piala Dunia yang akan dilangsungkan pada Oktober 2022 nanti.

"Saya lihat, dukungan dari pihak pemerintah sudah mulai masuk, semoga ini konsisten dan berkesinambungan," papar Ledia dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7).

Dia menambahkan, dukungan dari seluruh stakeholder juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas Garuda INAF. Khususnya, untuk berlaga pada Piala Dunia nanti. Misalnya, pemenuhan gizi tambahan bagi pemain dan alat-alat penunjang lainnya.

Pada laga kualifikasi Piala Dunia lalu, timnas masih menggunakan tingkat medis. Padahal, umumnya sepak bola amputasi menggunakan tingkat custom yang disesuaikan dengan kondisi pemain serta terbuat dari bahan yang lebih lentur.

"Ini pertama kalinya timnas kita bisa berlaga di Piala Dunia. Oleh sebab itu,

dukungan stakeholder diperlukan. Bagi pihak-pihak lain yang ingin memberi support, ayo silakan," papar Ledia. Sekretaris Fraksi PKS DPR ini juga menyatakan mendukung penuh Garuda INAF. Ia berharap, timnas ke depannya bisa terus berprestasi, baik di Asia maupun dunia.

"PKS tentu akan komitmen mendukung Garuda INAF. Harapan kami, timnas bisa memperoleh prestasi yang terbaik, khususnya di ajang terdekat nanti, yakni di Piala Dunia," tutur dia.



DUKUNGAN DARI PIHAK PEMERINTAH SUDAH MULAI MASUK, SEMOGA INI KONSISTEN

Ledia Hanifah Amaliah,
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS
Dapil Jawa Barat I

Di sisi lain, lolosnya Garuda INAF ke Piala Dunia jadi ironi karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Untuk berangkat ke Bangladesh melakoni laga kualifikasi Piala Dunia Garuda INAF harus patungan.

Padahal, Indonesia Amputee Football Association (INAF) atau Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia (PSAI) sudah memiliki legalitas yang sah. Selain terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, PSAI juga merupakan anggota resmi dari badan sepak bola amputasi dunia atau World Amputee Football Federation (WAFF).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akhirnya mencoba untuk berbenah. Kemenpora akan membiayai pemusatan latihan timnas yang akan berjalan tiga bulan ke depan.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, Chandra Bhakti mengatakan, Kemenpora akan mengucurkan dana untuk biaya pelatnas timnas yang berkekuatan 15 pemain. Bahkan, Chandra menyebut pihaknya akan memantau seluruh persiapan timnas.

"Kemenpora akan terus memantau sekaligus memastikan pelatnas Garuda INAF berjalan dengan baik. Dan, Kemenpora berharap mereka bisa meraih prestasi maksimal saat tampil di Turki nanti," ucap Chandra beberapa waktu lalu. ([validnews.id](https://www.validnews.id))



Haerul Amri Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Wisata Religi



Mohammad Haerul Amri, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Nasdem Dapil Jawa Timur II

Anggota Komisi X DPR RI Mohammad Haerul Amri meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) RI untuk mengembangkan industri wisata religi guna memberi manfaat positif bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi besar terhadap wisata religi. Namun hingga kini, potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal.

"Selama ini wisata religi belum tergarap secara maksimal. Kita bisa melihat bagaimana ibadah umroh menjadi kekuatan wisata religi, jutaan masyarakat Indonesia pergi ke Arab Saudi setiap saat. Saya kira potensi di Indonesia juga besar, termasuk Jawa Timur," kata Gus Aam, sapaan akrabnya dalam raker Komisi X DPR RI dengan Menparekraf Sandiaga Uno beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

”

**SELAMA INI
WISATA RELIGI
BELUM
TERGARAP
SECARA
MAKSIMAL. KITA
BISA MELIHAT
BAGAIMANA
IBADAH UMROH
MENJADI
KEKUATAN
WISATA RELIGI**

Gus Aam menjelaskan, ada banyak wisata berbasis agama yang tersebar di Indonesia saat ini. sehingga dirinya optimis apabila hal tersebut dikembangkan serius oleh pemerintah, destinasi tersebut dapat semakin

meluas dan berefek pada peningkatan ekonomi kreatif yang berbasis kerakyatan. Terlebih, menurutnya UNESCO sudah mendesak agar pengembangan destinasi wisata harus beriringan dengan masalah konservasi alam.

Gus Aam berharap wisata di Indonesia ke depan tidak muncul ketidakseimbangan, yakni terjadi kemajuan pada pariwisata, namun terjadi kerusakan lingkungan di waktu yang sama. Maka dari itu, ia menuturkan perlu ada edukasi dan kampanye menyeluruh mengenai pemanfaatan lingkungan dari pihak-pihak terkait. "Tidak hanya Kemenparekraf tapi semua Kementerian terkait harus ada kerjasama," imbuh politisi Partai NasDem tersebut.

Ia mendesak ada inovasi pengembangan industri pariwisata sebagaimana sebagaimana sudah diatur dalam UUD dan cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Terlebih industri pariwisata sebaiknya bertumbuh pada pintu gerbang utama alias Destinasi Super Prioritas (DSP) dan destinasi lainnya. "Karena itu perlu digenjut pembangunan industri pariwisata yang lebih merata, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Di sana, banyak sekali destinasi wisata yang bagus, namun terkendala dengan biaya transportasi yang mahal," pungkasnya. (hal/sf)

Komisi X DPR Akan Revisi UU Kepariwisataaan agar Bermanfaat untuk Daerah

Komisi X DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Tujuannya agar UU Kepariwisataaan dapat bermanfaat bagi sumber perekonomian daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

“Juga termasuk ekonomi kreatif, kalau ekonomi kreatif sudah ada undang-undangnya baru kita selesaikan Nomor 24 tahun 2019. Itu alhamdulillah, itu membawa dampak pendapatan asli daerah dalam hal ekonomi kreatif,” kata anggota Komisi X Ferdiansyah saat berkunjung ke Demak, Jawa Tengah yang ditayangkan secara virtual, Jumat (15/7).

Ferdiansyah menuturkan, pihaknya hingga saat ini belum menyetujui anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitranya. Anggaran tersebut akan disetujui dalam kurun waktu 2 bulan sebelum anggaran 2023 berjalan.

“Jadi Oktober (2022). Masih ada waktu. Jadi pembahasan undang-undang tentang APBN ini masih babak penyisihan, nanti akhirnya bulan September (2022), kita bahas kembali setelah nota keuangan presiden pada tanggal 16 Agustus 2022,” ujar Ferdiansyah.

Sebagai informasi, pagu indikatif yang diusulkan pemerintah kepada Komisi X, meliputi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) sebesar Rp 80,1 triliun, Kementerian

Ferdiansyah
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi Partai Golkar
Dapil Jawa Barat XI



”
JADI OKTOBER (2022). MASIH ADA WAKTU. JADI PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG TENTANG APBN INI MASIH BABAK PENYISIHAN, NANTI FINALNYA BULAN SEPTEMBER (2022),

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Rp 3,3 triliun, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Rp 1,6 triliun, dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebesar Rp 675,9 miliar.

Karena itu, kata Ferdiansyah, pihaknya berharap bisa berkoordinasi dengan seluruh pihak baik dari kementerian maupun lembaga, sehingga tercipta sinergitas yang baik antara Komisi X dengan pemerintah.

“Selesai acara ini masing-masing kepala dinas berkoordinasi dengan mitra-mitra kami, agar apa yang bisa dilakukan untuk sisa tahun sekarang dan tentunya harapannya yang lebih baik untuk tahun 2023,” katanya.

Bangkitkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ahmad Basarah Inisiasi Gerakan BISA

Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, M.H. bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menginisiasi gerakan bersih, indah, sehat, dan aman (Bisa) diberbagai destinasi wisata yang ada di wilayah Malang Raya.

Gerakan Bisa adalah program unggulan Kemenparekraf bekerjasama dengan Komisi X DPR RI untuk mempersiapkan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru pada masa transisi Pandemi Covid-19. Basarah menyampaikan, bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat nyata terhadap pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk meminimalisir persebaran virus tersebut, Pemerintah terpaksa menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat skala besar. “Akhirnya banyak pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti kuliner, restoran, usaha UMKM dan, industri lainnya yang tidak mampu bertahan dan mengalami penurunan pendapatan atau omset yang secara drastis. Dikarenakan menurunnya jumlah daya beli masyarakat,” ujar Ahmad Basarah, Sabtu (24/6/2022).

Pemerintah Indonesia, sudah melakukan dan mencanangkan berbagai tahapan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Basarah menyebutkan, setidaknya terdapat tiga tahap upaya recovery di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah dijalankan pemerintah. Yaitu melalui program perlindungan sosial, pembukaan tempat wisata secara bertahap, dan menggencarkan promosi.

Ketiga tahapan tersebut, lanjutnya,

”

GERAKAN BISA SEBAGAI UPAYA MEMBANGKITKAN SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DI MALANG RAYA

Ahmad Basarah,
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi PDI-P
Dapil Jawa Timur V



adalah upaya nyata pemerintah untuk bisa kembali menggairahkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Kegiatan kerjasama dengan Kemenparekraf ini, merupakan bagian dari fase normalisasi,” ucapnya.

“Dimana Komisi X DPR RI, sebagai mitra strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong peningkatan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, dengan cara mengakselerasi program-program di daerah pariwisata,” sambung Basarah.

Pada kesempatan kali ini, Basarah memaparkan bahwa pihaknya telah menginisiasi, Gerakan Bisa sebagai upaya membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Malang Raya di tiga titik.

Yakni berada di Bendungan Karangates, Pantai Modangan, dan Desa Ngadas. Di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang secara resmi Basarah membuka Gerakan BISA, yang kemudian dilanjutkan dengan acara gotong-royong membersihkan wilayah sekitar guna membangkitkan rasa kepemilikan dan kepedulian warga terhadap lingkungan Pantai Modangan.

Kerjasama mitra Komisi X dengan Kemenparekraf, kata Basarah yang melibatkan para pelaku usaha dan juga pekerja di sektor pariwisata pada hari ini.

“Bagian dari tanggung jawab konstitusional saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili Dapil Malang Raya,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Nuroji Nilai Banyak Wisata Penunjang di Demak yang Belum Terpublikasi Dengan Baik

Anggota komisi X DPR RI Nuroji menilai banyak potensi wisata penunjang di Kabupaten Demak yang belum tereksplore dan terpublikasikan dengan baik. Ia menilai daerah tersebut memiliki potensi wisata yang masih bisa dimaksimalkan.

"Saya melihat di Kabupaten Demak ini banyak potensi wisatanya. Tapi belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik," ujar Nuroji saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2022).

Ia mengakui, bahwa selama ini publik lebih melihat Kabupaten Demak sebagai destinasi wisata religinya. Pertama karena makam Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari sembilan wali penyebar agama Islam. Kedua adanya Masjid Agung Demak yang cukup tua dan bersejarah.

Namun, ternyata masih banyak potensi wisata penunjang di Demak yang belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik. Sebagaimana yang dipaparkan Bupati Demak, Eisti'anah bahwa Kabupaten Demak memiliki sebuah pantai yang cukup unik, selain berpasir, juga ada hutan mangrove yang bisa disusuri dengan menggunakan perahu.

Pantai Istambul namanya, ini merupakan singkatan dari Istana Tambakbulusan, sebuah nama desa dimana lokasi pantai ini berada, yang tepatnya berada di Kecamatan Karangtengah. Belum lagi wisata budayanya dengan upacara adat

grebek, dan wisata kuliner ikan asap kepala manyung, minuman khas Demak Coro serta berbagai makanan ringan khas Demak.

"Ini menjadi sebuah potensi wisata yang cukup besar, wisata penunjang yang juga harus dipromosikan dengan baik. Salah satunya dengan cara yang cukup murah, lewat media sosial, IG,

seorang budayawan Betawi ini meyakini dengan semua terpublikasi dan diviralkan dengan baik, maka para wisatawan Religi yang tadinya mengunjungi Demak hanya untuk berziarah ke Makam Sunan Kalijaga, maka akan berlama-lama berada di tempat tersebut. Karena adanya wisata penunjang tadi, plus berbagai kuliner khas Demak.



Anggota komisi X DPR RI Nuroji foto bersama usai Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2022). Foto: Ayu/Man

Facebook dan Tik tok yang saat ini sedang tren. Kemudian Viralkan lewat medsos tersebut. Untuk kreatifitas serahkan ke anak muda, pasti mereka bisa," papar Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Anggota DPR yang juga sebagai

"Yang pada akhirnya akan ada menambah penghasilan, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, dan tentunya berujung meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut," pungkasnya. (ayu/aha)

Komisi X Minta Dinas Pariwisata Kota Salatiga Sertakan Master Plan Taman Wisata Sejarah

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid mengaku terkejut saat mengunjungi Taman Wisata Sejarah di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Lantaran tidak adanya penjelasan berupa master plan maupun Detail Engineering Design (DED) Taman Wisata Sejarah.

Ia meminta pihak terkait untuk menampilkan master plan pembangunan tersebut. "Jadi kami tadi kaget ketika berkunjung ke taman wisata yang rencananya adalah taman sejarah ya. Kenapa kami kaget, karena tidak ada penjelasan bahwa itu baru rencana, yang ternyata anggarannya pun baru 10 persen," katanya.

"Saya sampaikan tadi kepada Kepala Dinas tolong itu ditampilkan dengan sangat baik, karena ini baru rencana. Baru rencana kami paham bagaimana keadaannya," katanya usai meninjau Taman Wisata Sejarah, di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).

Lebih lanjut, Sodik menilai kawasan yang dibangun menjadi Taman Wisata Sejarah Salatiga secara prospeknya cukup bagus. Mengingat kondisi lahan yang cukup luas dan dilengkapi taman-taman di belakangnya. Ia optimistis ke depannya pembangunan pariwisata ini akan cukup prospektif. Hanya saja ia menekankan agar dinas menyertakan master plan dan DED-nya.

"Kami minta bagaimana master plan-nya bahkan dengan DED-nya. Jika master plan dan DED-nya bagus, maka insha Allah akan ada prospek. Dan saya juga tadi mendorong agar selain mengandalkan dana pemerintah pusat adalah dana kemitraan dengan swasta,

Sodik Mudjahid
Anggota Komisi X DPR RI
Fraksi Partai Gerindra
Dapil Jawa Barat I



”
JIKA MASTER PLAN DAN DED- NYA BAGUS, MAKA INSHA ALLAH AKAN ADA PROSPEK.

yang kami minta tadi kemitraan dengan swasta serta master plan dan DED yang lengkap serta penampilan yang komunikatif sehingga orang mau untuk investasi di tempat itu," ujarnya. Sementara Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes mengatakan memang Kota Salatiga belum memiliki destinasi pariwisata yang memadai, sehingga Pemerintah Kota Salatiga bertekad membuat taman wisata sejarah ini. Ia mengapresiasi usaha dan upaya Pemkot Salatiga tersebut. Mengingat

pembangunan taman wisata sejarah, apalagi sejarah militer, dapat menjadi destinasi pariwisata yang edukatif bagi anak dengan mengenalkan kepada anak-anak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang.

"Karena wisata sejarah apalagi berbasis militer ini akan memberikan edukasi luar biasa buat anak-anak kita, buat generasi kita bahwa kita ini adalah bangsa pejuang. Kita ini bangsa yang sangat luar biasa struggle menghadapi berbagai macam tantangan," katanya.

"Ini harus diungkap baik dalam pelajaran di kurikulum maupun di situs-situs sejarah. Hanya memang baru 10 persen pembangunannya, masih panjang, perlu dukungan dari berbagai pihak. Menurut saya agar rancangan di situ sejarah berbasis militer ini dapat terwujud dan menjadi salah satu destinasi menarik di kota Salatiga, insha Allah," ucapnya.

Malang Potensial Jadi Destinasi Wisata Nasional

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hasanuddin Wahid meyakini bahwa Malang bisa menjadi destinasi wisata nasional asalkan para pelaku pariwisata yang ada, baik pemerintah dan pihak swasta, bisa saling bersinergi dengan baik. Hal lain yang juga perlu dikuatkan dalam mendukung peningkatan sektor pariwisata adalah dengan membuat kalender even yang menarik agar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara berhasrat untuk berkunjung ke Malang.

"Di Malang ini Komisi X melihat bahwa kalender even itu masih belum tertata dengan kuat dan belum bisa dipahami oleh banyak pihak. Kalender even yang menarik inilah yang harus dimiliki oleh Kabupaten Malang agar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mau berkunjung kesini. Karena Malang mempunyai alam yang luar biasa. Gunung, sungai, laut, kebun apel, perkebunan, lahan pertanian, semuanya bisa menjadi obyek wisata. Artinya alam di Kabupaten memberikan sejuta daya tarik bagi wisman atau wisnus untuk datang ke Malang," ujar Hasanuddin di Malang, Jatim, Jum'at (17/6/2022).

Selain itu, lanjutnya, perlu diadakan berbagai festival wisata yang dikemas secara bagus untuk menarik wisatawan agar mau datang ke Malang. "Infrastruktur juga memang perlu kita benahi lagi. Karena infrastruktur menjadi kunci. Beberapa tempat wisata yang ada di Selatan Malang itu jalan dan

”
**MALANG
BISA
MENJADI
DESTINASI
WISATA
BAGI
TURIS-
TURIS
LUAR
NEGERI**



Muhammad Hassanudin Wahid, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Timur V

infrastruktur lainnya memang perlu diperbaiki, sehingga orang semakin mudah untuk menjangkau kawasan wisata itu," imbuhnya.

Ia berharap, nantinya Malang juga bisa menjadi salah satu tujuan wisata internasional. "Jadi bukan hanya wisatawan domestik, tapi benar-benar menjadi tujuan dari wisatawan internasional. Kita harapkan Malang bisa menjadi destinasi wisata bagi turis-turis luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama,

Politisi Fraksi PKB itu juga menegaskan bahwa seluruh destinasi wisata di Indonesia wajib hukumnya menggunakan promosi digital, termasuk Kabupaten Malang. "Karena lebih dari 60 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang potensi mahasiswanya saja sudah bisa menjadi wisatawan nusantara. Melek media sosialnya juga cukup tinggi di kabupaten Malang ini. Oleh karena itu jika promosi digital ini dilakukan dengan masif tentu akan jadi lebih baik," tutup Hasanuddin.

Perlu Sinergi Bersama Kenalkan Potensi Pariwisata Kabupaten Semarang

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menilai Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi alam yang luar biasa. Bahkan tidak kalah seperti Bali. Ia mengatakan, Kabupaten Semarang memiliki beragam kekayaan alam dan ekonomi kreatif yang layak untuk diapresiasi dunia. Melihat potensi ini, Agustina mendorong seluruh mitra kerjanya bersama Pemerintah Kabupaten Semarang bersama pihak terkait l

ainnya untuk dapat bersinergi dalam menciptakan peluang pariwisata yang lebih menarik.

“Di sini ada danau, namun dalam sebutan Jawa adalah rawa, namanya Rawa Pening. Menariknya, di sini menawarkan Jetski sebagai prasarana Rawa Pening. Kemudian ada kerajinan tangan juga. Pas banget buat ibu-ibu yang suka pernak-pernik, atau mau bikin tempat tisu, tas kecil, clutches, alas untuk tatakan panas, dan masih banyak lagi. Intinya semua barangnya rapih. Yang enggak kalah menarik, di sini juga menawarkan kopi. Kopinya tidak kalah menarik dengan kopi Gayo, Temanggung. Pokoknya enak banget deh,” tutur Agustina saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau potensi pariwisata di Bukit Cinta Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jateng, Jumat (17/6/2022).

Sejauh ini, sarana dan prasarana sudah memadai, namun yang perlu dikembangkan adalah memperbanyak event. Hal ini guna mendorong wisatawan untuk datang ke Rawa Pening. “Menurut saya, event ini harus diperbanyak. Sejauh ini memang sudah dilakukan, tetapi hanya setahun sekali. Bahkan selama pandemi, 2 tahun tidak ada sama sekali. Saya berharap stakeholder-nya ikut support. Jadi selain event ‘Save Rawa Pening’ yang sudah dilakukan

setahun sekali, berupa kegiatan membersihkan sampah dan eceng gondok ini, seharusnya ada pengenalan tari-tarian juga, ada pertunjukan, dan perbanyak kegiatan belanja ekonomi kreatif masyarakat setempat,” pungkask politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Melihat potensi wisatawan Rawa Pening adalah pegiat lingkungan hidup dari seluruh dunia, Agustina berpendapat agar Pemkab Semarang mengambil kesempatan berharga ini. “Pemerintah Kabupaten haruslah menjadi koordinator, yaitu koordinator yang sekaligus mengajak stakeholder terkait untuk terjun langsung ke lapangan. Tadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pak Wakil Bupati menyampaikan permohonan untuk dikawal pada APBN nantinya, yaitu untuk atraksi dan uminity. Hal ini akan kita dukung, supaya masyarakat dapat mengenal Rawa Pening sebagai destinasi wisata tujuan,” pungkask Agustina.

”
KABUPATEN SEMARANG MEMILIKI POTENSI ALAM YANG LUAR BIASA, BAHKAN TIDAK KALAH DENGAN BALI

Legislator dapil Jateng IV itu berharap agar Pemkab Semarang segera bersiap dan serius menangani potensi ini. Kesiapan SDM harus baik, serta perlu diadakan bimbingan teknis. Selain itu, perlu dukungan dalam membangun keyakinan jajaran Pemkab. “Terkadang investasi jika tidak ada masa depannya suka diragukan, faktornya karena melihat ABPD-nya kecil. Peran Pemerintah Kabupaten harus berani mengambil risiko. Jika event Rawa Pening ingin menjadi event yang besar, diperlukan ambisi dan sinergi dengan banyak pihak,” pesan Agustina.



Agustina Wilujeng Pramestuti
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P
Dapil Jawa Tengah IV

Nuroji Kritisi Rencana Meningkatkan Tarif Tiket Masuk Candi Borobudur Setinggi Langit

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menilai rencana pemerintah menaikkan naik tarif tiket masuk wisata Candi Borobudur sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu bertolak belakang dengan promosi destinasi wisata.

"Memang Borobudur perlu dijaga kelestariannya, tapi bukan dengan menaikkan tarif yang selangit. Itu bertolak belakang dengan promosi destinasi wisata ini. Kepentingan konservasi dan wisata memang perlu seimbang Tapi bukan menaikkan harga setinggi itu," ujar Nuroji kepada Parleментарia, Minggu (5/6/2022)

Politisi fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa pembatasan jumlah wisatawan yang naik ke Candi Borobudur itu bisa dilakukan dengan membatasi jumlah pengunjung atau beban berat candi. "Soal guide (pemandu wisata), dalam rapat terdahulu dengan pengelola, saya sampaikan bahwa guide-nya tidak profesional, kenapa? Karena, antara satu guide dengan yang lain, tidak sama, saat menceritakan sejarah Borobudur, dengan kata lain berbedabeda versinya. Dan begitu saya tanya ternyata guide tersebut berasal dari, Palembang," ungkapnya. wisata tersebut tidak tahu namanya. Ditambahkannya, seharusnya untuk menjadi pemandu wisata perlu pelatihan dan pembekalan tersendiri tentang

”

MEMANG BOROBUDUR PERLU DIJAGA KELESTARIANNYA, TAPI BUKAN DENGAN MENAIKAN TARIF YANG SELANGIT.

sejarah wisata candi tersebut, dan lingkungan sekitarnya

Sehingga antara satu pemandu wisata dengan pemandu wisata yang lain satu cerita alias ada kesamaan. Dan yang terpenting merupakan sejarah asli candi tersebut. "Dan yang tidak kalah penting, untuk memberdayakan warga sekitar atas keberadaan candi Borobudur itu juga harus dilakukan Penataran, pelatihan atau pembekalan terlebih dahulu," pungkasnya. Sebagaimana diketahui belum lama ini Menkomartim dan investasi mengumumkan akan membatasi pengunjung Candi Borobudur dan menerapkan tarif baru untuk tiket masuk bagi turis asing maupun lokal.

Tak tanggung-tanggung, pengunjung lokal atau turis lokal nantinya diharuskan membayar tiket Rp750.000 untuk sekali masuk. Sementara wisatawan mancanegara, bakal dikenakan tarif USD100 atau jika dirupiahkan setara dengan Rp1.443.000 (kurs USD1=Rp14.400) atau hampir dua kali lipat dari harga tiket untuk turis lokal.



Nuroji, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat VI

Komisi X Soroti Rencana Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta kenaikan harga tiket

naik Candi Borobudur dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, Candi Borobudur sebagai cagar budaya sekaligus destinasi super prioritas, tidak hanya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kementerian/lembaga, akan tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan Badan Pengelola Cagar Budaya setempat.

“Pertama, kegaduhan di Borobudur itu ada tuntutan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya bahwa disitu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat sekitar yaitu Badan Pengelola Cagar Budaya,” ucap Fikri dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap Kemenparekraf mendorong percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP). Percepatan ini, jelasnya, dinantikan oleh para pelaku ekonomi kreatif supaya implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bisa diterapkan.

“Konon katanya, sudah di meja presiden, tapi meja yang mana tidak tahu. Sekarang belum ada kejelasan.

”

KEGADUHAN DI BOROBUDUR ITU ADA TUNTUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA BAHWA DISITU MELIBATKAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN KOTA, DAN MASYARAKAT SEKITAR YAITU BADAN PENGELOLA CAGAR BUDAYA

Abdul Fikri Faqih Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah IX

Oleh karena itu, kami tidak bisa mendorong UU ini terlaksana kalau PP ini tidak terbit,” ungkapnya.

Terakhir, mewakili Komisi X DPR RI, Fikri menyampaikan dukungan terhadap usulan penambahan usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf/ Baparekraf pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp952,1 miliar. Legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut meminta agar Kemenparekraf/Baparekraf menguatkan usulan tersebut dengan narasi yang meyakinkan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.



Putra Nababan Kritik Pengumuman Harga Tiket Borobudur dan TN Komodo

Sejumlah anggota Komisi X DPR RI mengkritisi cara pemerintah mengumumkan kenaikan harga tiket Candi Borobudur hingga Taman Nasional (TN) Komodo kepada masyarakat. Diketahui, beberapa waktu lalu, kenaikan harga tiket Candi Borobudur dan TN Komodo ramai diperbincangkan karena menjadi mahal. "Saudara menteri, saya sebetulnya setuju dengan kita me-reserve Komodo dan Borobudur. Tapi yang saya kurang setuju adalah narasinya," ujar anggota Komisi X DPR Fraksi PDI-P Putra Nababan dalam rapat kerja bersama Kemenparekraf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Putra mengatakan, narasi yang pemerintah sampaikan seolah-olah baru saja terjadi breaking news, di mana harga tiket ke Candi Borobudur dan TN Komodo naik.

"Sekarang Komodo is untouchable dengan harga segitu. Borobudur itu tidak bisa kita sentuh. Mungkin narasinya harus dibuat, ceritanya, kenapa kita harus meng-reserve, kenapa kita harus menghargai," tuturnya. Lebih jauh, Putra menyebut seharusnya pemerintah tidak langsung mengabarkan kenaikan harga tiket secara mendadak. Meski demikian, Putra setuju dengan niat menaikkan harga tiket demi menjaga konservasi Candi Borobudur dan TN Komodo.

"Tapi bagaimana mengemasnya, menyampaikan kepada masyarakat, sehingga kita punya rasa memiliki," kata Putra.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Fraksi Nasdem Haerul Amri mengingatkan bahwa pariwisata harus berjalan beriringan dengan persoalan konservasi. Menurutnya, jangan sampai tempat wisatanya maju, tapi justru menjadi rusak karena ketidakdisiplinan wisatawan yang berkunjung. "Saya kira ini harus ada edukasi yang besar dari kita, kampanye-kampanye, edukasi yang menyeluruh yang tidak

hanya melibatkan teman-teman kementerian. Tapi juga harus ada kolaborasi dengan kementerian lainnya," jelas pria yang akrab disapa Aam ini.

Ditemui usai rapat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan pihaknya mendapat masukan dari Komisi X DPR agar tidak fokus kepada harga tiket yang naik. "Bagaimana ini di narasinya ini dilakukan suatu penyesuaian. Jangan narasinya tentang uangnya, tapi tentang peran masyarakat untuk menjaga situs-situs yang perlu kita jaga kelestariannya, destinasi-destinasi yang harus kita pastikan keberlanjutannya," ucap Sandiaga. (Kompas.com)

”
**SEKARANG
KOMODO IS
UNTOUCHABLE
DENGAN
HARGA SEGITU.
BOROBUDUR
ITU TIDAK
BISA KITA
SENTUH**



Putra Nababan, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI-P Dapil DKI Jakarta I

Komisi X Apresiasi Jokowi Batalkan Wacana Tarif Naik Borobudur

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan wacana tarif naik Candi Borobudur Rp 750 ribu bagi wisatawan lokal dan USD 100 bagi turis asing. Huda meyakini ada langkah kebijakan untuk menjaga kelestarian candi selain mematok tarif tiket. Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan wacana tarif naik Candi Borobudur Rp 750 ribu bagi wisatawan lokal dan USD 100 bagi turis asing. Huda meyakini ada langkah kebijakan untuk menjaga kelestarian candi selain mematok tarif tiket.



Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Barat VII

"Kami tentu sangat mengapresiasi langkah tegas Presiden Jokowi yang membatalkan wacana tarif naik Candi Borobudur yang sempat dilontarkan Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan beberapa waktu lalu. Kami yakin ada banyak cara untuk menjaga kelestarian candi alih-alih memasang tarif tinggi bagi wisatawan yang ingin naik ke Stupa Borobudur," ujar Huda dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Huda menilai penerapan tarif yang tinggi tersebut akan menurunkan ancaman terhadap kerusakan Candi Borobudur. Menurutnya, upaya

melindungi struktur bangunan candi diterjemahkan dengan pembatasan jumlah pengunjung.

"Tidak ada jaminan jika tarif tinggi akan menurunkan ancaman kerusakan Candi Borobudur. Harusnya ketegasan melindungi Borobudur diterjemahkan dengan pembatasan jumlah pengunjung

”

**TIDAK ADA
JAMINAN JIKA
TARIF TINGGI
AKAN
MENURUNKAN
ANCAMAN
KERUSAKAN
CANDI
BOROBUDUR**

sesuai kajian Balai Konservasi Borobudur," ujar politikus PKB itu. Huda menegaskan kebijakan menaikkan tarif naik ke Candi Borobudur itu nantinya akan menciptakan diskriminasi sosial dan dapat membatasi umat Buddha untuk melakukan ibadah.

"Nantinya Borobudur hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berduit saja. Bahkan bagi umat Buddha kebijakan tarif tinggi tersebut akan mengancam kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah di Kawasan Candi Borobudur," ujar Huda.

"Maka keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan wacana tarif untuk naik Candi Borobudur dengan aspirasi mayoritas masyarakat," imbuhnya. Huda memastikan pihaknya pun terus mengawal proses tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan tetap menjaga kelestarian Candi Borobudur dan kepentingan pelaku wisata.

"Kami dari Komisi X DPR akan terus mengawal proses tersebut sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah bisa tetap menjaga kelestarian Borobudur dan menjaga kepentingan pelaku wisata di kawasan tersebut," ujarnya.



KEGIATAN KOMISI X **KUNJUNGAN TIM RESES KOMISI X DPR RI DI KENDAL**



KOMISI X Melakukan Kunjungan kerja di Kabupaten Kendal



KUNJUNGAN TIM RESES KOMISI X DPR RI DI DEMAK



KOMISI X Melakukan Kunjungan kerja di SMK Negeri 1 Demak



KUNJUNGAN TIM RESES KOMISI X DPR RI DI SALATIGA



KOMISI X Melakukan Kunjungan kerja di Salatiga



KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI DI NEGARA DENMARK



Kunjungan kerja luar negeri Komisi X DPR RI di Denmark

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja luar negeri diplomasi bidang pendidikan ke negara Denmark pada tanggal 12 s/d 18 Juni 2022. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja yang dipimpin oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), di antaranya melakukan pertemuan dengan; (1) Kementerian Anak dan Pendidikan Denmark, (2) Danske Maritime/MAN Energy Solution, (3) Kasper Sand Kjaær, Ketua Komisi Pendidikan di Parlemen Denmark (Folketinget), (4) LEGO Foundation, (5) Kementerian Pendidikan Tinggi Dan Sains Denmark, dan (6) Siemens Group, Copenhagen Business School dan Aarhus University.

Kegiatan kunjungan kerja ini ditujukan untuk melakukan perbandingan sistem pendidikan, bentuk peraturan dan kebijakan pendidikan serta kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di negara Denmark dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan evaluasi perbandingan berbagai kebijakan pendidikan nasional saat ini khususnya Kebijakan Merdeka Belajar.



PANDANGAN MINI FRAKSI-FRAKSI KOMISI X DPR RI TERHADAP RUU TENTANG PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI



Pandangan mini Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan



Pandangan mini Fraksi PPP disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal



Pimpinan Komisi X DPR RI (Kanan Dr. Dede Yusuf, Kiri Dr. Hetifah Sjaifudian) saat pimpin pandangan mini Fraksi-Frasi RUU tentang Pendidikan & Layanan Psikologi tingkat I (satu) Komisi X DPR RI



Saat Penandatanganan persetujuan RUU Pendidikan & Layanan Psikologi tingkat I Komisi X dengan Pemerintah untuk di tetapkan menjadi UU pada tingkat II melalui Paripurna DPR RI.

PANDANGAN MINI FRAKSI-FRAKSI KOMISI X DPR RI TERHADAP RUU KEOLAHRAGAAN



Pimpinan Komisi X DPR RI pada penetapan RUU Keolahragaan dan RUU Pendidikan & Layanan Psikologi dengan Pemerintah untuk di tetapkan menjadi UU pada tingkat II melalui Paripurna DPR RI.

PANDANGAN MINI FRAKSI



Fraksi PDI-P



Fraksi Partai Golkar



Fraksi Partai Gerindra



Fraksi Partai Nasdem



Fraksi Partai PKB



Fraksi Partai Demokrat



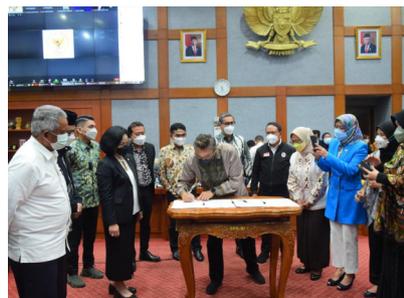
Fraksi PKS



Fraksi PAN



Fraksi PPP



Saat Penandatanganan persetujuan RUU Keolahragaan tingkat I Komisi X dengan Pemerintah untuk di tetapkan menjadi UU pada tingkat II melalui Paripurna DPR RI.



OPINI

Harapan Masyarakat Melalui Regulasi Keolahragaan

Oleh M. Masad Masrur*



UU INI TEPAT WAKTU, MENINGAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19, MASYARAKAT PERLU MENJAGA KESEHATAN

DPR dan Pemerintah pada Selasa 14 Februari lalu, meluncurkan UU Keolahragaan

menggantikan UU No. 3/2005 Tentang Sistem Keolahragaan (UU SKN). Pemerintah maupun DPR menilai bahwa kehadiran UU ini tepat waktu, mengingat di tengah pandemi covid-19, masyarakat perlu menjaga kesehatan.

Data Riset Kesehatan Dasar Kemenkes RI 2018 menyebutkan bahwa 33,5% orang Indonesia kurang aktifitas fisik. Penelitian ini menyebutkan, akibat kurangnya aktivitas fisik, seseorang lebih berisiko terkena berbagai penyakit. Di era pandemi covid-19, kemungkinan tertular virus juga semakin besar jika kondisi kesehatan masyarakat tidak maksimal akibat malas bergerak. Alasan ini mendorong DPR dan pemerintah memperluas cakupan ruang lingkup olahraga, yang semula disebut olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat yang tujuannya akhirnya adalah menggerakkan seluruh masyarakat (sport for all).

Ruang lingkup lain yang menjadi sorotan tentu adalah olahraga prestasi. Negara peraih medali terbanyak, biasanya memiliki kelembagaan keolahragaan yang baik, penyelenggaraan pendidikan keolahragaan tersistem, pola rekrutmen terprogram, pembinaan terencana, penghargaan yang wajar,

serta industri olahraga yang maju.

Lebih dari dua dekade terakhir, penurunan prestasi olahraga sulit teratasi. Di Asian Games 2018, prestasi kita “ditolong” oleh Cabor non-olimpik. Di Olimpiade, tradisi medali emas sejak 1992 terputus di tahun 2012. Tidak ada Cabor lain selain bulutangkis, angkat besi dan panahan, yang menyumbangkan emas Olimpiade.

Penurunan prestasi ini akibat strategi pengelolaan organisasi olahraga yang kurang tepat, sarana dan prasarana yang kurang memadai, peran pemerintah yang lemah maupun anggaran yang minim. Oleh UU



DI OLIMPIADE, TRADISI MEDALI EMAS SEJAK 1992 TERPUTUS DI TAHUN 2012 AKIBAT PENGELOLAAN ORGANISASI YANG KURANG TEPAT

Keolahragaan, beberapa masalah ini dijawab melalui klausul kewajiban Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit dua Cabor unggulan yang dipertandingkan di olimpiade. Kewajiban ini didukung oleh kewajiban penyediaan anggaran olahraga dalam APBN/APBD dan dukungan dana perwalian yang dikumpulkan dari masyarakat. Dana olahraga dari Pemerintah Pusat bisa mengucur langsung kepada Cabor prioritas sebagaimana disebut dalam Perpres 86/2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Cabor non-prioritas maupun Cabor unggulan daerah, masih mendapatkan anggaran hibah melalui KONI Pusat dan KONI Daerah mengingat profesionalitas manajemen anggaran Cabor dinilai masih lemah.

Peran KONI dan KOI/NOC dalam perkembangan prestasi olahraga sangat besar, namun akibat ego masing-masing, bahkan beberapa kepentingan prestasi olahraga dikorbankan. Kedua lembaga ini bahkan dianggap sebagai “biang keladi” penurunan prestasi olahraga nasional dan mengusulkan penyatuan kedua lembaga tersebut. UU SKN dianggap tidak memberi kewenangan yang jelas kepada masing-masing lembaga.

Isu kelembagaan ini menjadi isu yang paling alot dibahas. Pemerintah mempertahankan eksistensi kedua lembaga karena kehadiran mereka tidak didasarkan pada regulasi yang sama. KOI/NOC wajib independen sebagai wakil IOC di Indonesia yang dilegitimasi oleh Olympic Charter,

sementara KONI adalah komite olahraga yang didukung oleh regulasi negara. Keduanya tidak mungkin dilebur meskipun dapat dipimpin oleh satu orang yang sama yang dipilih secara konstitusional. Akhirnya, melalui kompromi politik yang panjang, pemerintah dan DPR tetap menyepakati eksistensi kedua lembaga dengan mempertegas dan memperjelas kewenangan keduanya.



PERAN KONI DAN KOI/NOC DALAM PERKEMBANGAN PRESTASI OLAHRAGA SANGAT BESAR, NAMUN AKIBAT EGO Masing-masing, BEBERAPA KEPENTINGAN PRESTASI OLAHRAGA DIKORBANKAN.



KEHADIRAN UU KEOLAHRAGAAN TENTU MENJADI HARAPAN BARU BAGI KITA

Keberadaan BAKI dan BAORI juga menjadi sorotan. Dengan adanya UU baru ini, eksistensi mereka diuji. Hanya akan ada satu lembaga arbitrase olahraga yang berafiliasi ke lembaga arbitrase olahraga internasional. Keberadaan lembaga antidoping juga diperkuat dengan nomenklatur yang menyebutkan keharusan afiliasi lembaga antidoping internasional.

Keberadaan olahraga prestasi untuk tetap eksis bersaing di kancah internasional, jelas tidak bisa lepas dari regulasi olahraga internasional. Oleh karena itu, kepentingan penyusunan regulasi olahraga nasional tentu tidak bisa berseberangan dengan aturan olahraga (*lex sportiva*). Begitu pula olahraga bagi penyandang disabilitas. Penguatan NPC dan kewajiban pemerintah mendukung pengembangan bagi olahragawan disabilitas dilihat dari adopsi UU Keolahragaan terhadap UU 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas. UU Keolahragaan nampak berupaya menyamakan hak terhadap olahragawan dibanding olahragawan disabilitas melalui bentuk penghargaan.

Kesejahteraan merupakan isu krusial dalam bidang olahraga. UU Keolahragaan memberi terobosan bagi olahragawan dan pelaku olahraga untuk mendapat perlindungan jaminan sosial, merupakan terobosan baru yang perlu diapresiasi. Hal ini seiring dengan upaya UU Keolahragaan dalam mengangkat olahragawan sebagai profesi.

Pengakuan UU Keolahragaan kepada kehadiran olahraga berbasis teknologi, dianggap melegakan

meski di sisi lain mengkhawatirkan. Olahraga yang basis kegiatannya adalah gerak fisik, tereduksi oleh kehadiran teknologi yang biasanya meminimalisir gerak fisik. Beberapa tahun belakangan, jenis olahraga tersebut mampu “menggerakkan” masyarakat melalui ketrampilan berbasis fisik. Olahraga berbasis teknologi dianggap memiliki kesamaan dengan “gerak” olahraga seperti pada catur atau bridge. Pengakuan KONI terhadap Cabor e-sport didasarkan oleh pengakuan badan olahraga dunia seperti OCA atau SEAGF yang mempertandingkan olahraga berbasis elektronik. Alasan ini memperkuat pemerintah dan DPR memasukkan olahraga berbasis teknologi dalam UU Keolahragaan.

Kejelasan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Penyelenggaraan olahraga berbasis teknologi selama ini didominasi oleh lembaga ekonomi kreatif. Bukan hanya olahraga berbasis teknologi, dalam sisi bisnis olahraga, setiap penyelenggaraan kejuaraan Cabor tertentu perlu ada batasan yang tidak dapat dilampaui masing-masing pihak. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dikemas profesional, di satu sisi dapat menjadikan industri olahraga tumbuh dan berkembang, namun di sisi lain, nilai sportifitas dan tujuan kebugaran olahragawan harus diperhatikan. Olahragawan tidak dapat dieksploitasi terus menerus “tampil” melebihi kemampuan fisik yang mereduksi tujuan berolahraga. Kehadiran UU Keolahragaan tentu menjadi harapan baru bagi kita. Namun tujuan peningkatan kesehatan, prestasi, dan kesejahteraan, tidak dapat diwujudkan hanya melalui sebuah regulasi. Konsistensi dan komitmen semua pihak dalam pelaksanaan UU Keolahragaan sangat penting, kecuali jika hanya ingin mengganti satu aturan ke aturan lain tanpa upaya konkrit mendukung olahraga. Pemerintah, pelaku olahraga, pelaku bisnis, masyarakat umum perlu menyadari bahwa pembangunan negara dapat diwujudkan melalui

terbentuknya masyarakat yang sehat melalui olahraga. Ketangguhan menghadapi pandemi menjadi ujian pertama bagi sport for all. Bisakah melalui UU Keolahragaan, tujuan sport for all dapat diwujudkan, butuh komitmen kita yang kuat.

*M. Masad Masrur adalah TA Komisi X DPR RI dan merupakan mahasiswa Program Doktor Universitas Sahid Jakarta





ANGGOTA KOMISI X DPR RI



DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

